



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH RAPAT

**RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI DENGAN DIRJEN
AGRO KEMENPERIN, KETUM GAPKI, ASOSIASI PRODUSEN CPO,
KETUA ASOSIASI PRODUSEN MINYAK GORENG, KETUM SPKS,
KETUM APKASINDO**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: V
Rapat ke-	: ...
Jenis Rapat	: Dirjen Agro Kementerian Perindustrian RI, Ketum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Asosiasi Produsen CPO, Ketua Asosiasi Produsen Minyak Goreng, Ketum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) dan Ketum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Perjuangan (Apkasindo Perjuangan)
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Selasa, 24 Mei 2022
Waktu	: Pukul 14.15 s.d. 17.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara 1, Jakarta
Ketua Rapat	: Maman Abdurrahman, S.T.(F.P-Golkar/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI)
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti/Kabagset. Komisi VII DPR RI
Acara	: Penjelasan mengenai tata kelola industri CPO dan minyak goreng
Hadir	: 34 orang anggota hadir dari 52 orang Anggota Komisi VII DPR RI dengan rincian sebagai berikut:

A. Anggota DPR RI:

PIMPINAN :

1. Dony Maryadi Oekon/F.PDI Perjuangan/ Wakil Ketua Komisi VII DPR RI
2. Maman Abdurrahman, S.T./F.P-Golkar/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

8 orang anggota dari 11 anggota:

1. H. Yulian Gunhar, S.H, M.H.
2. H. Nasyirul Falah Amru, S.E.
3. H. Andi Ridwan Wittiri, S.H.
4. Mercy Chriesty Barends, S.T.

5. Dr. Ir. Willy Midel Yoseph, M.M.
6. Ribka Tjiptaning Ploretariyati
7. Novri Ompusunggu
8. Herman Hery

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

5 orang anggota dari 7 anggota:

1. Ir. H.M. Ridwan Hisyam
2. Ir. Lamhot Sinaga
3. Muhammad Fauzi, S.E.
4. Dyah Roro Esti Widya Putri, B.A., M.Sc.
5. Bambang Patijaya, S.E., M.M.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

4 orang anggota dari 6 anggota:

1. R. Wulansari
2. Katherine A. Oendoen
3. H. Iwan Kurniawan, S.H.
4. H. Nurzahedi, S.E.

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

3 orang anggota dari 4 anggota:

1. Ina Elisabeth Kobak, S.T.
2. Arkanata Akram, S.T., B.E. (Hons) M.Eng.Sc.
3. Rico Sia

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

2 orang anggota dari 5 anggota:

1. Hj. Ratna Juwita Sari, S.E, M.M.
2. H. Marwan Ja'far

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

4 orang anggota dari 5 anggota:

1. Sartono Hutomo
2. Zulfikar Hamonangan, S.H.
3. Rusda Mahmud
4. Drs. Hendrik H. Sitompul, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

4 orang anggota dari 5 anggota:

1. Ir. H. Tifatul Sembiring
2. H. Rofik Hananto, S.E.
3. Dr. H. Mulyanto, M. Eng.
4. H. Nurhasan Zaidi, S. Sos.I.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

2 orang anggota dari 3 anggota:

1. H. Asman Abnur, S.E., M.Si.
2. H. Nasril Bahar, S.E.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

0 orang anggota dari 1 anggota:

B. PEMERINTAH/UNDANGAN

1. Putu Juli Ardika (Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian)
2. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS)
3. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)
4. Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI)
5. Asosiasi Petani Kepala Sawit Indonesia Perjuangan (Apkasindo Perjuangan)
6. Eksportir Minyak Jelantah Indonesia
7. Pengusaha Cangkang Sawit Indonesia
8. Asosiasi Pengusaha Pengemas Minyak Goreng Indonesia (APPMGI)
9. Pengusaha Non Asosiasi

JALANNYA RAPAT :

KETUA RAPAT (MAMAN ABDURRAHMAN,S.T./F-P.GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI) :

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera.

Saya ucapkan untuk semuanya, wabil khusus Pimpinan Komisi VII yang hadir secara ghaib, ghaib itu *virtual* Pak, dan juga buat Teman-teman anggota Komisi VII yang hadir secara langsung dan juga secara ghaib, dan Yang saya hormati Pak Dirjen Agro beserta dengan rombongan, Hadir bersama-sama dengan kita juga teman-teman dari gabungan pengusaha kelapa sawit, mana Pak yang hadir Ketum, lalu Asosiasi Produsen CPO.

Mana ya, oh nggak ada ya, memang nggak ada ya? Oh, Asosiasi Produsen Minyak Goreng? Nggak ada juga, apa? Beda. Asosiasi, ini apa?

Asosiasi Serikat Petani Kelapa Sawit oke, lalu Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Perjuangan,

Waduh ini PDIP Pak, ini luar biasa ini memang PDIP nih udah merambah sampai ke sektor kelapa sawit, terus nggak apa-apa Pak, dari Asosiasi Produsen Minyak. Yang mana? Ini? Oh hadir semua nih, oh ini saya ulangi lagi.

Dewan Minyak Sawit Indonesia,
Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia,

Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia,
Apolin (Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia), lagi *on the way*,
Asosiasi Pengusaha Cangkang Kernel Sawit Indonesia, oh ada lagi kernel,
Asosiasi Eksportir Minyak Jelantah, luar biasa minyak goreng minyak-minyak
nih,
Asosiasi Perusahaan Pengemasan Minyak Goreng Indonesia, wah ada lagi
khusus lagi ya,
Direktur PT Industri Nabati Lestari, nah ini terakhir
Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, ada ya tadi petani.

Terus kalau asosiasi minyak angin ada nggak? Oke, minyak gosok.

Ya, terima kasih Bapak-Bapak yang hadir bersama-sama dengan kita
21 anggota 7 fraksi artinya sudah kuorum. Saya ingin sampaikan Pak,
perkenalkan saya Maman Abdurahman satu-satunya pria dengan rasa apel
segar, Pak.

Jadi saya Pimpinan Komisi VII dari Fraksi Partai Golkar diminta oleh
teman-teman untuk memimpin RDP ini. Pada kesempatan kali ini, tentunya
Bapak-Bapak semua sudah sangat paham dan mengerti, apa maksud tujuan
kita Bapak-Bapak diundang dalam rapat RDP dengan Komisi VII pada siang
hari ini. Ini semua tentunya bagian dari sebuah proses perjalanan yang
lumayan cukup panjang terkait isu minyak goreng. Jadi saya perlu berpikir yang
bisa di goreng-goreng itu saya pikir saham aja Pak, ternyata minyak goreng ini
pun di goreng lagi gitu.

Jadi artinya Bapak-Bapak kita undang semua di sini dalam rangka
supaya kita bisa mendapatkan sebuah gambaran yang utuh, penjelasan yang
komprehensif, dan informasi yang faktual terkait mengenai tata kelola niaga di
sektor industri dari minyak goreng ini. Jadi, mudah-mudahan rapat ini bisa
memberikan sebuah hasil yang optimal lah untuk kita dalam rangka untuk
mendorong upaya optimalisasi dan perbaikan tata kelola minyak goreng di
negara kita, yang tentunya *output*-nya di akhirnya adalah untuk kebaikan
bangsa negara ini.

Pada kesempatan hari ini saya mohon izin kepada teman-teman
Anggota Komisi VII, apakah rapat ini kita dalam eh kita jalankan dalam terbuka
atau tertutup, bukan buka tutup.

Oh terbuka ya. Jadi rapat ini kita jalankan dengan, apa.

Oh tergantung, ini semua tergantung, bisa aja kalau mau kita buka,
sekali-sekali kita tutup, apa tutup buka gitu bisa. Ya ini kan sama kayak ekspor
ini kan, kemarin ekspor tutup, buka lagi. Nah nanti bisa tutup lagi Pak, jadi sama
kayak rapat kita ini Pak bisa di buka tutup, jadi kita terbuka ya.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.15 WIB)

Ya, terima kasih.

Dan yang kedua, Bu nanti rapat selanjutnya jam berapa, oh nggak ada. *Alhamdulillah* dong berarti kita bisa lanjut sampai jam 8 malam nih. Tadi saya pikir ada rapat Pak, jam 4 tadi Pak tadi jam 4 sore. Jadi tadi kita mau batalin sampai jam 4 paling telat setengah 5, ternyata kalau nggak ada berarti lanjut kita Pak.

Ya, kita putuskan sementara rapat ini kita jalankan selama kurang lebih 2 jam ya karena terkait protokoler. Jadi Bapak-Bapak beruntung, berdoa terus lah Pak semoga Covid ini ada terus supaya Bapak rapat 2 jam aja maksimal. Jadi ada alasan untuk menyetop rapat, ya rapat ini kita buat 2 jam ya nanti kalau memang ternyata di anggap perlu bisa kita tambahkan.

Ya saya pikir saya ini Pak, ada panjang Pak protokoler di sini Pak, penjelasan segala macam tapi nanti kalau saya baca ini semua jadi kayak saya yang di sidang Pak. Jadi bagus Bapak-Bapak aja langsung, ini tadi saya udah sampaikan di awal bahwa kami butuh penjelasan terkait mengenai kondisi dari minyak goreng ini. Kalau memang nanti di anggap perlu untuk mempresentasikan dari semua Asosiasi silakan, tapi sementara waktu dan tempat kita persilahkan dulu untuk Pak Dirjen, silahkan Pak Dirjen.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Terima kasih Pimpinan.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi VII DPR RI, dan Bapak Ibu anggota Komisi VII DPR RI, dan juga Asosiasi atau yang mewakili asosiasi yang terkait dengan perkelapasawitan.

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua,
Shalom,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan, dan
Salam sehat untuk kita semua.

Kami mohon izin Pak Pimpinan apabila diperkenankan kami akan *share* apa *share* persentasi bahan persentasi.

KETUA RAPAT:

Sangat di perkenankan, silahkan.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Terima kasih.

Ini kami sudah siapkan bahan-bahan, yang pertama kami sampaikan terkait dengan hilirisasi industri berbasis kelapa sawit. Lanjut, jadi memang dari aspek ya aspek pembangunan ini sangat berperan terutama untuk daerah-

daerah di luar pulau Jawa dan juga dari aspek ekonomi ini cukup besar kontribusinya terhadap ekonomi nasional. Jadi bisnis-bisnis yang terkait dengan industri perkelapasawitan ini sekitar 750 triliun, di mana 500 triliun itu merupakan hasil dari ekspor. Dari pajak juga dari pajak dan pungutan-pungutan ekspor dan bea keluar ini untuk tahun 2021 itu pajak dan pungutan ekspor ini hampir lebih daripada 100 triliun Pak kita dapatkan dari sini.

Dan kalau kita lihat Bapak, Ibu, Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI, pengembangan industri berbasis kelapa sawit ini, ini merupakan suatu *success story* ya *success story*. Di mana dalam 10 tahun ya dari 2011 kita bisa mengembangkan produk ya produk berbasis apa kelapa sawit ini dari 54 jenis menjadi 168 jenis, dan kita juga cukup berhasil untuk apa mengeksport produk-produk hasil industrinya. Jadi dalam presentasi kami kelihatan di sini bahwa tahun 2010 itu 60% ekspor kita adalah dalam bentuk CPO atau bahan baku industri. Tahun 2021 ini yang kita ekspor dalam bentuk bahan baku CPO tinggal 9,27%. Jadi apa CPO ini sudah kita olah dan Indonesia sudah berkembang.

Nah sebelah sebelahnya di, di apa, di kanan bawah ini terlihat nilai tambahnya. Jadi kalau CPO ini di olah menjadi minyak goreng, kalau CPO-nya itu nilainya 1 jadi kita akan ada nilai tambah menjadi 1,3%. Jadi apa kalau dia menjadi margarin itu nilai tambahnya menjadi 1,86. Nah kalau sampai menjadi apa kosmetik, ini bisa 3,88. Jadi dan juga untuk apa kesempatan ini 2,66, jadi nilai tambahnya cukup besar sekali dari CPO menjadi produk-produk hilirnya.

Nah ke depannya, jadi ke depannya kebijakannya ini adalah bagaimana kita bisa mengembangkan ya untuk pangan ya jadi *food and fitonutrient*, *fine chemical* ya dan juga *fiber biomass* disamping bahan bakar baik itu *bio fuel* maupun *green fuel*. Jadi *green fuel* ini, ini adalah suatu produk hidrogenesis dari apa dari bahan baku yang berbasis CPO dan ini kimia, jadi karakteristik kimianya itu jauh lebih bagus dari pada *fuel* dari *petroleum* ya baik itu untuk *green avtur*, *green premium*, *green diesel*, maupun *green gas* Bapak/Ibu.

Jadi ini karena dia tidak akan terkontaminasi oleh sulfur dan juga tidak akan terkontaminasi oleh logam-logam berat bawaan dari produk petroleum. Jadi kita akan mempunyai basis energi yang berkelanjutan samapi dengan dunia ini kiamat ya karena ini adalah suatu yang apa bisa kita *replanting* kembali.

Selanjutnya mohon izin kami menyampaikan sedikit gambaran terkait dengan alur proses. *Next*, jadi alur proses industri sawit ini. Jadi di titik awalnya adalah tanda buah segar, jadi kita menghasilkan 234 juta ton TBS pada tahun 2021, jadi setahunnya kira-kira seperti itu.

Nah, ini diolah menjadi CPO yaitu menjadi 52 juta ton ya CPO ini sebagian kecil yang di ekspor itu tadi 2,7 juta kiloliter dan yang jadi *bio fuel* juga tidak banyak yaitu 8,1 juta kiloliter dan untuk *oleochemical* sekitar 2,3 juta kiloliter. Nah yang paling banyak dari CPO ini, jadi 38 juta ton ya ini masuk ke dalam proses *refined palm oil*, *refined palm oil* ini sebagai apa hasil sampingan adalah ini PFAD. Nah dari RPO ini juga banyak yang di ekspor yaitu sekitar 8 juta

kiloliter, tapi sebagian besar itu masuk ke jalur RBD *palm oil* atau minyak goreng.

Jadi dalam proses pembuatan minyak goreng ini.

KETUA RAPAT:

Pak Dirjen.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Siap sedikit.

KETUA RAPAT:

Biar nggak lewat, biar teman-teman nih juga. Itu RPO, RPFAD, itu binatang apa itu jelaskan dulu Pak.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Ya, jadi gini Pak. Jadi RBDPO *palm oil* yang paling yang awal dari kuning-kuning yang sebelah sebelah kanan. Nah itu adalah minyak goreng Pak, jadi minyak gorengnya itu bisa dalam bentuk minyak goreng curah, minyak goreng kemasan sederhana, minyak goreng premium, maupun minyak goreng untuk industri. Jadi apa dan sebagian minyak goreng ini sebagai bahan baku olein industri hilir lainnya. Nah itu sebenarnya yang olein ini adalah minyak goreng. Nah di awalnya itu adalah itu *refined palm oil* di bahan baku minyak gorengnya Pak.

Nah ini yang banyak sebenarnya kita ekspor itu adalah dalam bentuk *olein* minyak goreng ini jadi 14 juta kiloliter per tahun. Jadi yang kita gunakan dari hasil minyak goreng ini 22 juta kiloliter itu 14 juta kita ekspor, 8 juta kita gunakan domestik.

KETUA RAPAT:

Pak sebentar.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Siap.

KETUA RAPAT:

Nggak ini biar mumpung ini biar nanti takut nggak kelewatan, di situ kan ada 94% *refined palm oil* yang warna *orange* tuh 36 juta oke. Naik dia tuh ke atas diekspor RPO tuh 8 juta, betul. Nah itu apa itu, ekspor RPO itu jadi *refined palm oil* itu langsung di ekspor.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Ya sebagian itu di ekspor Pak.

KETUA RAPAT:

8 juta.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

8 juta.

KETUA RAPAT:

Yang 28 jutanya masuk ke kanan itu ya.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Ya.

KETUA RAPAT:

Itu lah yang di bagi menjadi RBD *palm olein*, *stearin*, sampai di ekspor lagi, nah oke.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Gini Pak Pimpinan.

Jadi ini neracanya Pak Pimpinan, Bapak Ibu, jadi apa untuk persentase-persentase yang ada di sini. Jadi dari dari CPO dalam *refined* di *refined* itu 94% menjadi RPO, jadi 6% menjadi PFAD. Nah kalau RPO ini di proses ya apa ini akan menjadi minyak gorengnya 80%, menjadi margarinnya 20%. Jadi *stearin* itu margarin, ya *stearin* margarin.

Kami mohon izin kami lanjutkan.

Jadi kalau kita melihat profil lihat profil industri minyak goreng ini, ini produksi seperti kami sampaikan tadi itu 22,4 juta kiloliter, ekspor nya itu 11,80 juta kilo liter , jadi perolehan devisa devisa dari ekspor minyak goreng ini 12,25 miliar US dolar. Nah ini kebutuhan dalam negeri itu 5,8 juta kiloliter atau sekitar 25,8% dari produksi dalam negeri.

Nah jumlah industrinya ini ada 104 pabrik, ada 137 *packer* Pak. Jadi pabrik ini juga bisa jadi *packer* tapi ada juga *packer* yang independen yang mandiri. Jadi kapasitas kalau kita ada CPO-nya ada pasarnya apa lebih, sebenarnya kita mempunyai kapasitas 43,36 juta kiloliter. Jadi kita baru pakai untuk memproduksi sekitar 50%, jadi utilitasnya sekitar 50%, ini masih ada kemampuan untuk apa untuk memproduksi lebih.

Jadi kalau konsumsi per kapita Bapak Ibu, itu sekitar 11 sampai 12 liter per kapita per tahun. Jadi kalau 1 orang itu kira-kira sebulannya itu sekitar 1,1 liter Bu, jadi kalau sebulan seumpama 1 keluarga ada 5 orang di dalamnya, itu cuma sebulannya perlu 5 liter 5,6 liter Pak, jadi posisi seperti itu.

Nah ini Bapak/Ibu kalau kami lanjutkan, *next*. Jadi kami lanjutkan, memang apa dari sisi tempat-tempat produksi dengan konsumsinya memang agak berbeda sekali. Jadi Jawa itu konsumsinya ya, yang di luar Jawa ini adalah pusat-pusat produksi dan biasanya pusat-pusat produksi itu itu adalah yang disiapkan untuk ekspor, yang di kirim ke Jawa terutama ini untuk di olah kemudian jadi minyak goreng. Jadi kalau kita lihat apa perbandingan ini, ini ada yang memang *surplus* ya ada *surplus* dan memang ada zona-zona yang defisit terhadap kebutuhan. Jadi yang merah matrik yang sebelah kanannya.

Kami lanjutkan,

Bapak/Bapak Ibu Pimpinan yang kami hormati,

Jadi tanggal ratas ya ratas apa rapat terbatas kabinet dan juga dilanjutkan dengan rakernis Menko Eko ya. Nah ini diputuskan waktu itu yang dulunya semua di *tag* harga minyak goreng apa Rp14.000 yang premium ya sampai dengan yang curahnya Rp11.000, itu waktu itu di putuskan untuk melepaskan. Jadi mekanisme pasar untuk yang kemasan sederhana dan kemasan premium. Jadi yang di atur waktu itu adalah yang minyak goreng curahnya, jadi yang lainnya di lepas. Nah minyak goreng curahnya ini, ini dengan pendanaan BPDPKS, ya kalau bahasa trennya adalah subsidi.

Nah, waktu itu Bapak Ibu, Anggota Dewan,
Pimpinan dan anggota dewan yang terhormat,

Itu di putuskan kalau sebelumnya berbasis pada perdagangan, jadi perdagangan. Nah waktu tanggal 15-nya diputuskan untuk apa berbasis pada industrinya. Jadi industrinya di tugaskan diwajibkan, jadi kalau sebelumnya mekanismenya berbasis pada tata niaga dan lain-lain, ini berbasis pada industri. Nah di dalam pelaksanaannya ya itu memang diperlukan harga eceran tertinggi yang di ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan dengan Permendag Nomor 11 Tahun 2022. Nah, selanjutnya ya tanggal 17 ya 17 Maret ya ini di di keluarkan Permendag, Permendag 12 ya untuk menghapus DMO dan DPO pada saat.

Nah selanjutnya ada PMK, jadi ada beberapa perangkat perangkat peraturan pemerintah yang disiapkan untuk kita melaksanakan program ini, ada PMK Nomor 23 Tahun 2022 ini tentang apa pengaturan BPDPKS. Nah dari tanggal 15, 3 hari kemudian Permenperin Nomor 8 peraturan program subsidi ini baru bisa dikeluarkan 3 hari. Nah, untuk apa untuk bisa Permenperin ini bisa berjalan, jadi tanggal 19 itu diputuskan yang namanya harga keekonomian, ya harga acuan keekonomian daripada minyak goreng curah. Jadi harga acuan keekonomian ini di ditetapkan oleh BPDPKS atau Kementerian Keuangan. Jadi dengan harga acuan keekonomian dikurangi dengan harga eceran tertinggi ini lah selisih inilah yang dibayarkan oleh BPDPKS.

Ya selanjutnya pengaturan-pengaturan lebih lanjut ya. Nah program ini ya program ini rencananya ya dengan kemarin situ udah keluar apa tanggal tanggal 28 April ini ada Permendag 22 tentang pelarangan sementara ekspor CPO. Ya kami lanjutkan yang nomor 9, jadi pelarangan sementara ekspor CPO ya tadi RDP *palm oil* ya jadi minyak goreng dan *use cooking oil*, Pak.

KETUA RAPAT:

Itu *use cooking oil* itu minyak jelantah itu ya.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Minyak jelantah Pak, jadi minyak jelantah tapi namanya minyak jelantah Pak tapi harganya kalau kita ekspor itu lebih tinggi dari pada minyak goreng subsidi ini Pak.

KETUA RAPAT:

Oh iya bisa di pahami Pak.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Oh siap.

KETUA RAPAT:

Kalau di kampung saya itu banyak orang makan nasi pakai campuran minyak jelantah karena memang enak Pak, memang enak Pak.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Itu zaman Bapak sama sekarang udah nggak kali Pak, zamannya zaman udah lewat, mohon izin mohon maaf.

Jadi ya tanggal 23 kemarin itu sudah dikeluarkan Permendag 30 ya tahun 2022 ini tentang ketentuan ya ini ketentuan ekspor ya ekspor yang kemarin ditutup ini dibuka tetapi dengan apa dengan keharusan ke DMO, ini tanggal 23 ya Pak, dan juga apa saat ini udah ada yang tentang pendistribusiannya. Jadi Permendag, ada 2 Permendagnya sudah keluar sampai saat ini dan kami juga menindaklanjuti amanah, amanah daripada peraturan perdagangan ini kami tinggal menunggu di tandatangani oleh Menteri Perindustrian Menperin Pak kemarin konsepnya sudah kita sampaikan untuk perubahan ketiga mengenai determinasi program penyediaan minyak goreng curah dalam rangka dalam kerangka pendanaan BPDPK atau determinasi minyak goreng curah bersubsidi yang nanti mekanisme kembali ke DMO dan determinasinya minyak goreng curah bersubsidi ini tanggal 31 Mei 2022, itu tuh yang selanjutnya.

Mungkin selanjutnya mungkin aturan-aturan ini udah lewat yang memang tata cara dan semuanya udah kita apa jalankan. Nah ini mungkin saya

sampaikan sedikit bahwa semua yang kita lakukan, *next, next*. Semua yang kita lakukan di Kementerian Perindustrian itu berbasis *online* Pak, jadi pakai *industry four point zero*. Jadi ini kalau kita lihat tanggal 18, tanggal 24, jadi, jadi apa namanya Permennya tanggal 18, ini kalau kita lihat tanggal 24 ini hampir 85% sudah daftar dan kontrak, Pak. Jadi ini ini suatu apa suatu kerja yang luar biasa sementara perusahaan-perusahaan ini ada di seluruh Indonesia. Jadi kita hanya membutuhkan waktu yang sangat pendek untuk melakukan, bukan kami yang kontrak, kami memberikan *guidance* tapi yang kontrak itulah BPDPKS dengan perusahaan peserta program.

Jadi kalau kita lihat, kami kan mengeluarkan namanya nomor registrasi yang hijau, nah apa yang yang apa ungu itu adalah kontrak yang dilakukan antara perusahaan dengan BPDPKS. Jadi ini *alhamdulillah* dalam waktu yang sangat pendek sekali kita bisa melakukan kontrak dan penyaluran minyak gorengnya bisa kita dorong.

Nah selanjutnya, jadi dikontrak ini Bapak/Ibu, kita waktu itu kontrak sekitar 15,9 15,9 ribu ton untuk penyaluran per hari. Nah, kebutuhan itu mengenai kebutuhan rillnya itu adalah 6.565 ton Pak per harinya, jadi ini udah jauh daripada kebutuhan hariannya.

Nah untuk melaksanakan ini ya *next*, ini ada acuan Pak. Jadi harga acuan keekonomian ada sisi industri dan sisi distribusi, yang di atas ini sampai dengan nomor, nomor 6 ini sisi industrinya. Ya jadi apa harga minyak goreng di pabrik ditambah PPN, nah yang di bawahnya ini adalah biaya-biaya distribusinya. Nah sehingga,

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Sehingga kami membuat yang di kanan yang apa kekuning-kuningan itu Pak Maman, yang kuning-kuningan itu. Jadi bahwa, bahwa harga *loko* pabrik ke distributor itu minimal untuk per kilonya itu 13.333 rupiah per kilogram atau 12.050 rupiah per liter, ini untuk ke distributor. Nah untuk dari distributor ke pengecer itu maksimal dia di jualnya itu 14.389 per kilogram, sehingga HET ini tercapai ya atau 13.000 sehingga harga 14.000 per liter ini tercapai. Jadi ini yang kita jaga ya ini yang kita jaga dalam pelaksanaannya.

KETUA RAPAT:

Bentar Pak.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Siap.

KETUA RAPAT:

Itu kan harga *loko* pabrik distributor, yang produsen-produsen ini dia *supply* ke distributor segitu lah harganya 13.000.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Maksimal Pak maksimal.

KETUA RAPAT:

Maksimal. Nah itu yang 12.000 nya apa Pak.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Kalau yang 13.333 itu per kilonya Pak.

KETUA RAPAT:

Per kilo, kalau rencana per liter.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Ya.

KETUA RAPAT:

Per liter oke ya. Lalu dari distributor itu ke pengecer dapatlah harga 13.000-an per liter.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Per kilo.

KETUA RAPAT:

Per liter.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Eh 13.000 per liter siap.

KETUA RAPAT:

Nah terus HET diputuskan di 14.000, oh begitu siap. Oke lanjut Pak.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Terima kasih, Pak Pimpinan.

Kami lanjutkan, *next*. Ya memang ini untuk daerah-daerah tertentu ini perlu angkutan yang berbeda, nih angkutannya terus sarananya karena untuk ke Irian yang sebagian besar pelabuhannya tidak mempunyai pelabuhan curah jadi untuk bisa menyuplai minyak goreng dalam jumlah tertentu itu memang memerlukan pelabuhan curah. Nah kalau yang tidak ada pelabuhan curah, ini

perlu sarana untuk bisa membawa minyak goreng itu ke sana dan ini sudah ditambahkan untuk biaya jerigen atau *black in box*. Jadi ada apa *bag* nya setelah itu di taruh di dalam *box-box*, jadi biaya-biayanya untuk tertentu ini juga kami, *next*, ini udah kami edarkan ke semua untuk menjaga harga tersebut sesuai dengan ketentuan.

Nah selanjutnya untuk tata kelola maupun untuk, *next*. Untuk tata kelola penyaluran dari distributor ke ke pengecer dan ini menggunakan sistem informasi minyak goreng curah atau Simirah. Ya kami ya kami.

KETUA RAPAT:

Pak.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Ya Pak.

KETUA RAPAT:

Cantik nggak Simirahnya.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Nah ini mirah ini jangan keliru Pak, mirah itu murah kalau Jawa. Jadi sebenarnya lebih banyak bukan kecantikan tapi ke harganya.

KETUA RAPAT:

Lebih murah mana mirah apa ...(suara tidak jelas)... Ini Simirah ini berarti yang aplikasi yang baru di buat itu Pak ya.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Jadi memang kita dalam budaya Sangkuriang Pak, jadi jalan sambil membuat aplikasi memperbaiki aplikasi dan ternyata sangat bermanfaat. Jadi demikian apa manfaat daripada *industry four point zero* Pak, jadi karena kita pengusungnya ya kita pakai. Nah ini progresnya Pak, jadi di dalam Simirah ini kita bisa *traceable* barang itu. Jadi kapan di apa mulai dari pabriknya kalau dia pakai laut supaya kayak kemarin di bilang waktu kosong-kosong itu kita cek ke perusahaannya, perusahaannya bilang udah saya kirim sehingga kita nanya nomor kapalnya, di nomor gini dan kita bisa memetakan oh udah sampai disini sampai sini, demikian juga kendaraannya.

Nah dalam pelaksanaannya ini setiap pabrik itu dijagain polisi Pak karena kita kerjasama dengan polisi, distributor jagain polisi, dan semua instansi ini mengecek Pak karena kita ...(suara tidak jelas)...nanti kami sampaikan. Nah *next*, ini adalah realisasinya Pak.

Next next, oke oke ini adalah realisasi, nanti kita kembali ke tempat tadi. Ini realisasinya untuk bulan April, jadi bulan April kita sudah jadi makin dari minggu awal sampai minggu akhir ini karena di dekat apa, dekat dekat mulai libur lebaran itu minyak sudah banyak sekali di lapangan. Jadi ini selama sebulan ini distribusinya ini selalu lebih banyak daripada jadi akumulasi distribusinya selalu lebih tinggi lebih banyak daripada kebutuhan hariannya, akumulasi kebutuhan harian. Nah, di sini kebutuhan harian kita pakai 7.800 ton per hari. Jadi ada sebenarnya di sana tuh hampir 20% *safety factor*-nya dari pada kebutuhan kebutuhan riil yang berdasar data-data dari BPS maupun data dari dari Kementerian Perdagangan dan data lainnya. Jadi ada *safety factor*-nya itu sekitar 20% dari 6.500-an menjadi 7.800-an yang kita *supply*.

Nah ini terus berkembang banyak sehingga pada saat kita lebaran apa libur puasa, ini di lapangan sudah cukup banyak minyak gorengnya. Jadi ini di April itu kebutuhan yang sudah dengan *safety factor* 20% ini untuk kebutuhan per bulannya 194.634 itu sudah dapat di *supply* 211.638 ton atau 108,74%. Nah ini produsen 75 ini pengecernya, jadi kalau kita lihat distributor yang terlibat di sini ini ada sekitar 1.500-an distributor dan ada 18.405 pengecer Pak, 18.405 pengecer di seluruh Indonesia. Nah untuk bulan Mei ya bulan Mei, kalau lihat bulan, *next next*.

Nah ini kalau di lihat walaupun libur itu masih, jadi masih dalam suasana libur lebaran pun di penyaluran udah dilakukan Pak. Jadi penyalur dilakukan, kemudian di minggu keduanya makin bagus tapi ada libur lagi seninnya tapi ke performanya cukup bagus di minggu ketiga. Jadi ini meskipun banyak libur apa distribusi ini masih terjaga di atas kebutuhan ya dan pengecernya udah dari 18.000 sudah menjadi 22.759, ini ada penambahan pengecer demikian demikian juga penambahan di distributor, jadi perkembangannya cukup bagus ya.

Next, nah ini kami juga apa coba sampaikan. Ini kinerja daripada BUMN pangan juga cukup membaik Pak itu dari Maret itu 2 juta kilogram atau 2.273 ton itu di April udah berkinerja cukup bagus buat peningkatan 29.660 ton. Nah di Mei ini di Mei ini, jadi minyak ini karena terlalu banyak jadi ngejualnya tuh makin susah Pak. Jadi posisi sekarang itu ya posisi sekarang itu agak agak pelan ya agak pelan karena karena nah ini ini apa yang terjadi ya yang terjadi, nah yang sekarang yang banyak berperan itu adalah Bulog Pak, karena Bulog itu bisa lebih luas dan bisa maksudnya lebih ke daerah-daerah ke pedesaan dan juga daerah-daerah yang jangkauannya hampir di seluruh Indonesia. Nah, ini yang sedang kita dorong untuk bisa menyuplai daerah-daerah yang karena kita karena ini subsidi jadi 537 kota itu apa kabupaten kota harus kita penuh, kalau nggak kita di salahin Pak karena itu NKRI.

Ya nah ini juga,

Bapak/Ibu Anggota Dewan yang saya hormati,

Ini *next*, ini proses pembayaran klaim udah sudah berproses ya dan ini udah ada beberapa yang di bayar. *Next*, berproses dan kita melakukan

percepatan Pak. Jadi percepatannya itu bisa di bayar 80% walaupun belum *verify*, jadi verifikasinya setelah di bayar.

Next next next.

Selanjut halaman berikutnya. Oh ya, sebenarnya ada lagi sedikit. Kami sebenarnya ingin menyampaikan terkait dengan harga Pak. Jadi harga ini terus menurun menurun sekarang memang sudah mencapai 1 ini per kilonya 16.679 ya ini udah per kilonya sudah turun dari sekitar 19.000-an. Ya kita harapkan ke depannya ini akan.

KETUA RAPAT:

Mana Pak kok nggak ada, mana. Oh ini gara-gara Simirah nih.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Ya Pak kami lanjutkan, nanti kalau pas udah jalan nanti kami akan coba ini.

Jadi seperti itu, jadi harga juga udah mulai menurun, ini cukup bagus perkembangannya sehingga minyak sudah ada dan kita mempunyai kerjasama Pak. Di sini kenapa biaya kita cukup berhasil karena kita membentuk satgas gabungan kawal minyak goreng curah bersubsidi antara Kementerian Perindustrian dengan Polri, jadi satgas pangan. Kita juga punya kerjasama yang luar biasa dengan Perum Bulog dan ID Food, ya kita juga bekerjasama memberdayakan asosiasi ya Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia dan Inkoppas Industri Koperasi Pasar, ya kami juga bekerjasama dengan Kemendagri ya Kemendag untuk meng-*organize* distributor dan dan penyaluran di daerah.

Ya kenapa kita perlu, karena PO ini dari daerah. Jadi dari daerah ada kebutuhan dalam bentuk PO, nah *delivery order*-nya itu nanti akan menjawab kebutuhan tadi karena untuk penyaluran minyak goreng curah ini nggak bisa langsung di *drop drop* begitu saja tapi dari permintaan dari daerah, kenapa kita perlu ke daerah. Nah di samping itu juga ya kami banyak memfasilitasi ya mencari solusi-solusi baik itu transportasi dan terutama di daerah-daerah kepulauan yang ini yang apa kita lakukan dengan bekerjasama dengan KR Line.

Nah terakhir,

Pak Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI yang saya hormati,

Ini pada tanggal 31 Mei ini program-program bersubsidi ini minyak curah bersubsidi ini akan di ganti pakai kebijakan DMO DPO di tanggal 31. Nah terus *next*, nah ini nih kalau boleh.

Terus *next next* coba *next next next* lambat responnya Pak. Coba *next*, nggak di atasnya atasnya di atasnya yang tadi. Nah ini yang barusan harga di bawahnya ini. Ini saya yang hijau itu adalah stok Pak stok di setiap daerah.

Terus terus *next* pelan-pelan harus sabar itu, naik satu naik satu *slide*.

Nah ini, jadi itu Pak memang nggak ada di sini. Jadi program itu pada saat di lepas naik nya paling tinggi yang kedua itu pada saat minyak minyak kemasan dan minyak kemasan premium dan minyak kemasan sederhana itu di lepas yang curahnya ikut harganya naik ya yang yang apa gunung yang kedua yang paling kanan. Nah dari sana program ini dapat terus mengendalikan harga, yang di bawah itu adalah yang di Jawa, yang di atasnya itu adalah yang di luar Jawa. Nah sehingga ini dianggap cukup bagus sehingga program kembali ke DMO

Mungkin demikian yang dapat kami laporkan dan kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon arahan dan mohon masukan untuk ke memperbaiki kinerja yang telah kami lakukan.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak sebelum nanti saya lemparkan, saya mau interaktif sedikit aja nanti di sambut oleh teman-teman.

Kalau tadi Bapak udah sampaikan sudah ada sistem ya Simirah, lalu pengawasannya juga udah ini, terus sekarang itu yang Permenperin yang terakhir itu yang keluar kan itu apa Pak itu menggabungkan antara perindustrian dengan tata niaga yang di kepada Kemendag itu Pak ya, nah itu itu disampaikan aja Pak.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Mohon izin, Pimpinan.

Jadi di dalam apa Permendag ini ada 2 Permendag. Jadi Permendag yang terkait dengan pencabutan ya atau pelarangan ekspor ya untuk tadi CPO, RDPO, dan RPDP *olein* minyak goreng, serta *use cooking oil*, sekaligus mengatur ketentuan apa persetujuan ekspornya, jadi itu yang pertama itu mencabut dan ketentuan ke depannya. Nah dalam dalam Permendag itu memang mengamankan salah satunya mempertimbangkan, mempertimbangkan bahwa amanah itu yang kami apa kami pakai dalam perubahan ketiga Permenperin Nomor 8.

Jadi di buka opsi, di buka opsi bahwa subsidi atau pembayaran subsidi tadi itu bisa dimintakan dalam bentuk *cash* ke BPDPKS ya atau dipakai dipakai tidak di tagihkan tapi dipakai untuk menentukan apa kuota untuk persediaan ekspor. Itu Pak, jadi itu yang pertama.

Yang kedua, yang kedua supaya ada di gambaran tadi. Nah dalam melaksanakan distribusi ini, jadi Simirah itu merupakan salah satu *backbone* ya salah satu *backbone* dan itu diperluas ya mulai dari CPO-nya, RBDPO-nya, olein-nya atau minyak gorengnya ke distributor ya ke *retailer*, sampai transaksi kepada konsumen. Ini adalah *close loop* ya *close loop* dan si transaksi di *retailer* ke konsumen ini nanti ada bukti kayak.

KETUA RAPAT:

Oke, artinya begini. Yang Bapak mau sampaikan melalui binatang yang namanya Simirah ini, Bapak bisa kawal itu bisa monitor dari urusan dari pabrik sampai ke distributor sampai ke *retailer* dan terakhir ke pengecer gitu Pak ya, artinya bisa termonitor semua.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Siap Pak, dan stok-stok di tempat tempat itu kita bisa tahu.

KETUA RAPAT:

Nah, pertanyaannya satu Pak. Tadi kan Bapak udah nentukan harga itu sebetulnya masih masuk sesuai dengan HET tapi kenapa kita masih susah sekali untuk ketemu angka HET, ini rill nya itu Pak. Nah itu itu di buka aja Pak, apa, kita pengen tau nih sebelum nanti masuk ke temen-temen, biar nanti jadi gimana tuh Pak.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Ya karena HET itu ditentukan ya Pak, tadi kan Permendag melalui Permendag. Jadi untuk menjaga peraturan HET itu kan Permendag apa melakukan langkah-langkah ya untuk menjaga agar HET ini terjaga. Ya baik itu berupa ya baik itu berupa ketentuannya salah satunya adalah memasang spanduk bahwa ini adalah minyak bersubsidi atau minyak dengan harga HET. Itu memang udah di lakukan ya Pak sudah di lakukan tetapi di dalam prakteknya masih susah ya masih susah terjadi.

Pertama sekali adalah masyarakat masih belum *confident*, jadi masyarakat masih belum *confident* bahwa minyak itu ada, sehingga inilah yang dijadikan kesempatan oleh pengecer oleh *retailer* ya untuk ya untuk kalau memang mau beli di beli 17.000 kenapa saya jual 14.000 gitu, itu yang terjadi apalagi pada saat-saat apa hari raya keagamaan.

Nah yang kedua, memang pada saat itu penegakan hukumnya tidak sekeras sekarang dan ke depan, itu tidak sekeras sekarang dan ke depan, di mana kita sudah bisa menjaga *supply* yang *continue* ya *suppy* yang *continue*

dan stopnya ini sekarang ada disebelah masyarakat, maksudnya stop yang yang kita dorong itu adalah stopnya di distributor dan pengecer Pak. sehingga dia akan bisa kapanpun cari minyak dan berapapun, ini kan kembalikan *confident* ini kan sentimental pasar, demikian mungkin Pak terima kasih.

KETUA RAPAT:

Nah sejak dulu Pak sejak kapan urusan distributor, retailer, dan pengecer ini ada di Kemenperin. Kan setahu saya kan Kemenperin hanya urus urusan industrinya aja produksi aja. Nah sekarang kan Kemenperin ikut masuklah dalam urus distributor, terus urus retailer, dan apa tuh pengecer. Nah ini sejak kapan Pak.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Itu sesuai dengan amanah Pak, jadi sesuai dengan amanah rakortas dan sesuai dengan amanah ratas dan rakortas tanggal 15 Maret, ya bulan Maret 15.

KETUA RAPAT:

Ya artinya begini Pak, nggak saya perlu ini supaya gini Pak. Kami ini bukan pemain saham Pak yang tukang goreng-goreng saham, karena barang yang udah minyak goreng udah *ndak* perlu lagi di goreng udah pasti di goreng barangnya gitu loh Pak. Jadi kurang lebih begitu Pak, jadi kita mau supaya kita utuh, artinya apa, Komisi VII hari ini dulu kan kita kenapa nggak mau pesan utuh nih perusahaan distribusi karena kita tahunya di Kemendag gitu loh.

Nah per bulan Maret kan ini barang masuk di Kemenperin walaupun memang secara ini saya menganggap makin berat tugas Bapak-bapak ini di Kemenperin karena dalam konteks distribusi kan Bapak harus kawal lagi kan. Tetapi secara gambaran besarnya positif Pak, artinya 1 pintu, ini kan dulu letak permainannya ini kan karena antara industri dengan distribusi diawasi oleh dua institusi yang berbeda. Akhirnya dianggap ada potensi permainan karena koordinasi antar institusi ini kan relaif lebih sulit kalau dipegang oleh dua institusi daripada satu institusi. Artinya hari ini dipegang oleh Kemenperin Pak ya baik itu produksinya produsennya dan juga distribusinya, betul Pak.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Jadi sesuai dengan apa yang bisa mengklaim ini yang bisa mengklaim subsidi itu adalah produsen Pak. Nah untuk bisa mengklaim apa subsidi itu kan ada yang kami sampaikan harga acuan keekonomiannya yang diatasnya. Nah sehingga kalau kita nggak diawasi sampai penyerahan ke pengecer nanti subsidiya nggak bisa di klaim Pak. Jadi itu itu sebenarnya kenapa kita harus bener-bener ya melakukan *traceability* sampai penyerahan ke retailer. Nah ini dalam bekerja memang kami tidak sendiri, kami juga dibantu oleh perdagangan dan pihak-pihak lain, di semua lini ini memang ada masalahnya.

Siap. Jadi hanya di Maret sampai nanti dengan Maret tanggal 15 kemarin sampai dengan 31 Mei akhir bulan.

KETUA RAPAT:

Oh abis itu balik lagi ke Kemendag.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Siap.

KETUA RAPAT:

Oh, jadi waktu ribut-ribut kemarin masih minus masih di Kemendag Pak.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Jadi apa tanggal 15 itu di putuskan untuk menjaga atau menyediakan minyak goreng curah ini yang terjangkau di masyarakat dengan harga HET tadi ya sementara yang lainnya ini udah mekanisme pasar. Nah pada waktu itulah pengaturan yang untuk minyak goreng curah ini di apa ditugaskan kepada Kementerian Perindustrian. Jadi seperti kami sampaikan tadi itu berbasis industri, jadi penugasan ya wajib bagi produsen industri minyak goreng untuk ikut di dalamnya.

KETUA RAPAT:

Ya udah nangkap saya Pak.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Siap.

KETUA RAPAT:

Nggak saya kita cuman pengen tahu, berarti ini kan sementara aja nih hanya sampai tanggal 31 Mei Pak ya.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Eh setelah tanggal sebenarnya tanggal 23, 23 kemarin ini kan udah dilepas apa di lepas pelarangan ekspornya. Nah ke depannya ini kan berdasarkan kepada berdasarkan kepada DMO dan DPO. Jadi *domestic market*.

KETUA RAPAT:

Belum belum Pak, jangan dulu kesana.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Ya.

KETUA RAPAT:

Kami itu.

Bapak tenang tarik nafas dulu dikit, minum dulu Pak.

Kita belum sampai ke ekspor ekspor ini Pak, saya hanya mau dulu kita bicara yang distribusi-distribusi ini D1 D2 D3 adalah lagi ini udah kayak udah lucu-lucu. Jadi makanya, nggak kami lagi hanya mau me-*makesure* dulu, ini urusan distribusinya dulu, kita belum bicara ekspor nih. Artinya yang saya mau kita mau tahu ter tanggal 15 Maret kemarin urusan perindu, produsen kelapa sawit ini sampai ke urusan distribusi ini di bawah Kemenperin kan pendistribusiannya sementara tapi di buat tapi sampai tanggal 31 Mei ya, betul Pak, itu ya. Jadi setelah tanggal 31 Mei lepas lagi.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Izin Pak Pimpinan.

Jadi tanggal ini sampai tanggal 31 Mei ini program berbasis subsidi itu selisih harga tadi itu dihentikan.

KETUA RAPAT:

Ya, ya, ya, oke, oke.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Ya, Simirah tetap digunakan Simirah tetap digunakan baik untuk nanti menghitung yang tadi pertimbangan untuk menghitung ekspor maupun kedepannya membantu memfasilitasi industri, ya membantu memfasilitasi industri untuk bisa melaksanakan proses produksi sampai dengan ke pengecer tadi tetap digunakan Pak. Kami di posisinya adalah perindustrian sebagai pengelola ya sebagai pengelola dan pengembangan Simirah untuk mendukung program selanjutnya.

KETUA RAPAT:

Oke ya.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Pimpinan.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Terima kasih.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Pimpinan, interupsi.

KETUA RAPAT:

Iya silahkan Pak Nasril.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Pak Pak Dirjen, saya minta di detail kan ya terhadap paparan Bapak halaman 23. Nah di sini kan 31 Mei di *cut off* ya sistem subsidi menjadi sistem DMO, sebenarnya Komisi VII ingin menanti ini ya terhadap kebijakan DMO dan DPO. Nah ini kan ya kita kan bermitra ini, Bapak yang tahu berapa total produksi CPO ya yang hari ini 60% itu kecenderungannya ekspor, yang untuk pencapaian 500 triliun tersebut. Nah kebijakan DMO ini kan regulasinya apakah DPR bersama pemerintah atau kira-kira gambaran Bapak DMO itu gimana, berapa persen daripada total produksi.

Apakah bisa Bapak menggambarkan hari ini seperti bagaimana kita mengajukan DMO terhadap batubara ya, sehingga hari ini industri dan maupun PLN tidak merasa kekurangan batubara, nah kita juga ingin begitu. Apakah dari 40% total produksi itu akan di DMO-kan untuk mencukupi *domestic market* obligasi kita atau bagaimana gambaran Bapak. Ini Bapak perlu Pak halaman 23 ini, sebagai ini terminasi terakhir ini kan gitu.

Kalau usulan saya ya paling tidak harus di atas 30% gitu DMO-nya supaya tidak ada lagi permainan ekspor CPO di untuk mendapatkan legalitas ekspor dari Kementerian Perdagangan. Saya minta penjelasan ini loh Pak supaya sebelum ada pertanyaan lain terhadap halaman 23 ini Pak karena minggu depan sudah ini *cut off* untuk ini untuk subsidi.

KETUA RAPAT:

Silahkan Pak.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Terima kasih.

Ya kami mencoba Pak untuk menjelaskan, mungkin nanti tidak bisa memuaskan sekali Pak. Jadi gini, kalau sekarang kemarin ada belum ditentukan berapa persennya, tapi kemarin arahnya yang didapat rapat-rapat yang kami ikuti itu paling tidak 10 juta kiloliter per hari bisa di dorong *supply*-nya, eh 10.000, 10.000, 10.000 kiloliter Pak. Nah kalau kita sekarang

kan udah di atas 10.000. Jadi kebutuhan karena itungan curah itu curah untuk masyarakat itu kan 3 juta 3,7 juta, kayak gitu lah per tahunnya.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Oh pertahun.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Ya, nah sekarang kalau di itung dijadikan apa kebutuhan ya, arahnya seperti itu Pak sedang di formulasikan oleh Kementerian Perdagangan. Jadi ini sedang di di di carikan untuk bagaimana hitungan-hitungan tersebut ya sehingga paling tidak nanti ya paling tidak nanti per tahunnya itu ada 10 Juta sekitar itu lah 10 juta ton, jadi 3 kali kebutuhan untuk per tahunnya. Jadi untuk sementara seperti itu, tapi kami apa itu hanya kami dalam mengikuti rapat-rapat Pak tapi seperti apa keputusannya kami belum tahu secara pasti, gitu Pak terima kasih.

F-PKS (Ir. H. TIFATUL SEMBIRING):

Saya interupsi juga Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya silahkan Pak Tif.

F-PKS (Ir. H. TIFATUL SEMBIRING):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Pantun dulu Pak pantun dulu.

F-PKS (Ir. H. TIFATUL SEMBIRING):

Ya jadi apa Pak Dirjen tadi ya. Pak Ketua Pak Maman, saya apa melihat ini ya kelangkaan, analisa banyaklah ya tapi dengan keperindustrian ini sebetulnya maaf ya istilah saya itu pengalihan isu aja. Ini yang tanggung jawab ini kalau nggak Kementerian Perdagangan, kalau nggak Bulog, kenapa jadi ke perindustrian, tupoksi nya itu nggak tenang.

Jadi sebetulnya yang lagi di hajar oleh opini publik itu adalah Kementerian Perdagangan, ya Bulog juga nanti perlu ditanya. Coba aja pengalihannya, kejadiannya sudah sudah sejak akhir 2021, Maret nih baru dialihkan ke Kementerian Perindustrian terus akhirnya main cabut lagi main main aja kita ini. Apakah kita di jebak dengan ini gitu loh, terus tuduhannya kan si sebenarnya bukan Bapak sih tapi ada tuduhan dari pemerintah masyarakat menimbun.

Ada sinyal dari apa ini emang semua mesti di goreng nggak bisa di rebus di kukus. Ya itu kalau kan semua pengguna minyak goreng ini bukan Ibu-Ibu rumah tangga semata, tukang bakso perlu, tukang gorengan perlu, tukang siomay perlu minyak goreng, tukang ketoprak perlu minyak goreng, yang hidup sehari-hari dari minyak goreng itu banyak gitu, itu nggak usah di perdebatkan lagi lah ya. Ada yang bilang makan pisang sama dengan 1 piring nasi macam-macam, ada yang ngerebus bakwan saya lihat di apa di Tiktok itu.

Ya analisisnya banyak Pak Ketua, harga minyak nabati di luar naik, kan gitu kan ceritanya. Sehingga orang main gelaplah, program B30 yang di subsidi oleh pemerintah sampai hampir 52 triliun, 52 triliun sampai tahun 2021. Produsen nabati lain terdampak Covid, analisa banyak sekali gitu. Distribusi ada permainan dan sebagainya.

Tapi Pak jujur aja, apakah keputusan pengalihan tadi ditanya oleh Pak Ketua itu hanya keputusan teratas. Saya khawatir gini, kita ini kejebak di di di apa mengundang orang yang bukan mengetahui masalah sesungguhnya, masalah sesungguhnya adalah kita ini apa *greedy* apa istilahnya tamak Pak, nggak mau berbagi sama masyarakat ini sama rakyat ini gitu. Jadi yang kaya itu kepingin kaya banget gitu, ini kan permainannya ya produsen, distributor, orang-orang yang sekarang ini memegang ini.

Jadi saya, mohon maaf Pak Ketua, nggak bertanya sih cuman ini supaya mengingatkan supaya kita tidak terjebak kepada hal-hal yang seperti ini. Ini permainan aja ini karena kita termasuk komoditas termasuk gula, gula pasir maksudnya, termasuk minyak goreng, termasuk beras, sedikit aja dimainkan ini angkanya ratusan miliar. Jadi intinya adalah kalau di cecer juga ya akhir Mei selesai, ini udah di akhir Mei bentar lagi Bapak selesai angkat tangan bukan urusan saya lagi ya. Jadi kita ingin apa mengambil pelajaran kalau terjadi ya kalau bisa di ambil pelajaran supaya di masa yang akan datang nggak apa nggak terjadi lagi gitu. ...*(suara tidak jelas)*... juga di pilih maaf Bapak ya kurang lancar menjelaskannya jadi kita juga alur-alurnya susah juga nangkapnya.

Terima kasih Pak saya terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Pak Ketua setengah menit aja.

KETUA RAPAT:

Ya yaudah ini sama sama setengah menit, jadi kita kasih dulu setengah menit pertama.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Ya Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silahkan Pak Nasril.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen kira-kira lebih kurang tanda kutip 10 juta kiloliter per tahun, kan begitu. Saya ingin langsung Pak ya supaya Bapak bisa mengarahkan ke paling tidak kita ingin ketahui Pak ya. Berdasarkan, Bapak ini kan dari Deprin sedikit lebih sukses daripada Depdag Pak kan gitu, kita akui itu kita berikan apresiasi kepada Kementerian Perindustrian. Nah paling tidak ya jaminan bahwa pertama tadi ada jaminan tadi HET sudah mendekati kondisi hari ini mendekati HET yang sesungguhnya, itu ada 16.500 sekian, sementara HET kita kan sekitar 14.000 ya.

Nah ini paling nggak kita ingin mendorong, mendorong Kementerian Perindustrian bersama Komisi VII, berapakah kira-kira akan kita dorong DMO-nya, itu Pak. Artinya dorongan politik daripada Komisi VII ini juga Bapak butuhkan juga berapa DMO, apakah 30% ya tetap 30%, apakah 35%, sehingga ini ada jaminan ya tidak ada lagi lobi-lobi daripada industri minyak goreng kepada Kementerian Perindustrian, mau sekian mau sekian sehingga tidak ada jaminan untuk mendekati HET. Nah itu saya pikir saya meminta kepada Pimpinan bahwa paling tidak kita bisa dapat mengarahkan kesimpulan nantinya usulan DMO daripada Komisi VII, usulan DMO dari Komisi VII kepada pemerintah. Itu saya pikir Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik Pak Nasril.

F-PKS (NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I.):

Ya saya nyelak aja setengah menit.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PKS (NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I.):

Apa yang ditanyakan oleh teman sebelumnya bahkan oleh Pak Tifatul, ini yang Pak Tifatul ini mantan Menteri Pak jadi tau tukopsi Kementerian pernah 5 tahun di kabinet. Jadi menurut saya Pak Ketua sudah tidak relevan kita berdiskusi dengan perindustrian, tentu ini arahan Presiden ya tapi kan tidak masuk akal ini persoalan besar 31 Mei dikembalikan kepada perdagangan. Saya sudah analisa juga Pak, beberapa pertanyaan tapi saya berkesimpulan

saya tidak akan bertanya, jadi menjadi tidak relevan rapat kita, kembalikan kepada Komisi terkait Kementerian Perdagangan. Jadi ini saya lihat penguasaan penjelasan juga saya tidak membaca detail terutama tadi di jelaskan. Jadi menjadi tidak relevan rapat kita.

Assalamualaikum.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam Warahmatullah.

F-PDIP (Dr. Ir, WILLY MIDEL YOSEPH, M.M.):

Ketua tambahan.

KETUA RAPAT.

Ya ya silahkan Pak Willy Yoseph.

F-PDIP (Dr. Ir, WILLY MIDEL YOSEPH, M.M.):

Terima kasih, Willy Yoseph dari Fraksi PDI Perjuangan.

Saya juga menyimak apa yang telah disampaikan oleh Pak Dirjen, ya kelihatannya ini hanya memberikan informasi saja untuk kita. Ya sehingga dalam diskusi ini ya lebih baik saran saya ya kita mau mendengar kru yang dibawa Pak Dirjen ini yang juga kita undang gitu ya yang dari asosiasi-asosiasi ini ya siapa tahu ini ada banyak hal informasi-informasi yang bisa menjadi bahan kita gitu. Karena bagaimanapun karena urusan CPO urusan minyak goreng ini, ini tidak hanya di perindustrian, kadang juga di perdagangan, ada di Komisi IV ya dan seterusnya seperti itu.

Jadi menurut saya ya apa yang sudah di informasikan oleh Pak Dirjen ini sudah cukup banyak hal yang kita bisa pahami dan kita ketahui ya, tapi kalau memang Pak Dirjen bisa memberitahu *update* dari masalah carut marutnya minyak goreng saat ini ya lebih bagus juga kalau Bapak *update*-nya tuh hari ini tuh kondisi ini sudah kembali normal umpamanya dengan harga sudah sesuai dengan yang dipatoki gitu. Tetapi yang kita mendengar jeritan dari masyarakat Pak, dari para petani-petani kecil ya yang bukan perkebunan gede ya. Ya mereka itu saat ini tuh kesulitan bagaimana menjual hasil sawit mereka ya karena permasalahan harga murah kemudian juga malah sulit menjualnya gitu. Nah ini yang menjadi keluhannya menurut saya pasti di teman-teman asosiasi inilah yang banyak informasi.

Kira-kira itu masukkan saya Pimpinan, terima kasih. Saya kembalikan ke Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya terima kasih Pak Willy. Saya pikri respon dari kita sementara itu dulu. Nah saya setuju juga, kita memang Undang-Undang ada kernel lah, ada apa lah entah hak-hak gitu ya.

F-P. GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):

Pimpinan Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-P. GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):

Yang hadir ini darimana saja Pimpinan yang sudah.

KETUA RAPAT:

Ya ini makanya.

F-P. GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):

Di absen belum gitu.

KETUA RAPAT:

Ya sebentar-sebentar.

Jadi saya pikirkan itu tadi pemaparan dari Pak Dirjen. Selanjutnya saya mau ini kan tadi ada Dewan ...*(suara tidak jelas)*... Dewan minyak sawit pun ada juga, ada ada lagi banyak kali sawit nih.

Coba Pak dari masing-masing yang hadir ini Institusinya mana aja Pak, tolong Pak yang, Pak Dirjen, ini yang hadir Institusinya dari mana aja.

Bapak darimana Pak, Bapak.

ASOSIASI PETANI:

Asosiasi Petani Pak.

KETUA RAPAT:

Asosiasi Petani.

ASOSIASI PETANI:

Ya.

KETUA RAPAT:

Bapak juga ya, sama ya. Bapak dari.

GAPKI (GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT INDONESIA):

GAPKI.

KETUA RAPAT:

Bapak.

GAPKI, Petani, darimana Pak.

GIMNI (GABUNGAN INDUSTRI MINYAK NABATI INDONESIA):

Dari Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI).

KETUA RAPAT:

Oh minyak nabati.

GIMNI (GABUNGAN INDUSTRI MINYAK NABATI INDONESIA):

GIMNI.

KETUA RAPAT:

GIMNI.

GIMNI (GABUNGAN INDUSTRI MINYAK NABATI INDONESIA):

Ya Pak.

KETUA RAPAT:

Minyak nabati, terus mana lagi Pak. Sama ya GAPKI ya.

Bapak, minyak jelantah.

EKSPORTIR MINYAK JELANTAH INDONESIA:

Dari Eksportir Minyak Jelantah Indonesia Pak.

KETUA RAPAT:

Minyak jelantah.

EKSPORTIR MINYAK JELANTAH INDONESIA:

Dari Eksportir Minyak Jelantah Indonesia, Pak.

KETUA RAPAT:

Minyak jelantah, terus apa lagi.

PENGUSAHA CANGKANG SAWIT INDONESIA:

Saya dari Pengusaha Cangkang Sawit Indonesia.

KETUA RAPAT:

Oh Cangkang, oh kernel kernel Pengusaha Cangkang. Bapak yang baju putih, apa itu Pak, ini ndak ada suaranya.

ARDONO APPMGI (ASOSIASI PENGUSAHA PENGEMAS MINYAK GORENG INDONESIA):

Halo.

KETUA RAPAT:

Ya halo.

ARDONO APPMGI (ASOSIASI PENGUSAHA PENGEMAS MINYAK GORENG INDONESIA):

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Ya saya Ardono Pak dari APPMGI, jadi APPMGI ini Asosiasi Pengusaha Pengemas Minyak Goreng Indonesia.

KETUA RAPAT:

Oh Pengusaha Pengemas.

ARDONO APPMGI (ASOSIASI PENGUSAHA PENGEMAS MINYAK GORENG INDONESIA):

Iya Pak Pengemas.

KETUA RAPAT:

Dapat uang kemas kemas ini.

ARDONO APPMGI (ASOSIASI PENGUSAHA PENGEMAS MINYAK GORENG INDONESIA):

Begitulah Pak.

KETUA RAPAT:

Terus apa lagi, ada lagi, cukup ya.

F-P. GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):

Yang perjuangan tadi mana.

PERUSAHAAN INDUSTRI (NON ASOSIASI):

Saya dari non-asosiasi, Pak.

KETUA RAPAT:

Apa.

PERUSAHAAN INDUSTRI (NON ASOSIASI):

Dari non-asosiasi.

KETUA RAPAT:

Non-asosiasi.

PERUSAHAAN INDUSTRI (NON ASOSIASI):

Iya jadi itu dari Perusahaan Industri Minyak Goreng Non Asosiasi, jadi nanti kita gabung kami independen, Pak.

KETUA RAPAT:

Apa itu non-asosiasi itu. Oh Bapak-bapak dari perwakilan pengusaha tapi anti ama asosiasilah gitu Pak, iya ndak Pak.

F-P. GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):

Tidak masuk asosiasi dia.

KETUA RAPAT:

Iya pengusaha tapi anti asosiasi, begitulah ya. Tadi yang perjuangan mana perjuangan, oh dari ini Petani ya, oke yowes.

F-P. GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-P. GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):

Ini kan semuanya kan di hilir setelah CPO, kita pengennya yang juga yang apa apa yang produsen-produsen CPO ini yang pemilik-pemilik PKS asosiasinya di mana.

KETUA RAPAT:

Di GAPKI.

F-P. GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):

Di GAPKI ya, disitu jadi kita mau dalamin se-PKS, PKS ini, bukan PKS Partai Keadilan Sejahtera Pak soalnya beda-beda tipis ini, jadi Pemilik Kelapa Sawit.

ANGGOTA KOMISI VII:

Kalo di Karo PKS itu Partai Kalak Sembiring, Pak.

F-P. GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):

Kita mau dalamin nanti.

KETUA RAPAT:

Ya gini.

F-P. GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):

Tapi sebelum itu Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya silahkan Pak.

F-P. GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):

Sebelum mereka, saya tadi agak telat *sorry*. Saya tidak masuk kepada persoalan tadi minyak goreng yang tadi sudah di bahas teman-teman termasuk Permenperin yang akan berakhir akhir Mei ya dan berlaku 6 bulan kalau nggak

salah Pak ya, kalau say abaca rasanya Permenperin pernah berlaku sampai 6 bulan, 6 bulan tuh kapan Pak.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Jadi program-program subsidinya Pak.

F-P. GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):

Oh *sorry*.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Ya jadi untuk yang tadi itu masih proses administrasi.

F-P. GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):

Tapi Permenperin nya masih sampai 6 bulan, setelah itu baru di evaluasi lagi gitu Pak ya.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Demikian Pak.

F-P. GOLKAR (Drs. MUKHTARUDIN):

Nah saya tidak masuk ke situ, saya pengen nanti disampaikan data aja Pak ke kami. Saya pengen tahu persis data dari pabrik-pabrik kelapa sawit di seluruh Indonesia, di mana titik-titiknya, lokasinya di mana nih pabrik-pabrik kelapa sawit ini ya. Apakah merata seluruh nasional, apakah numpuk di Sumatera dan Kalimantan, artinya pabrik-pabrik kelapa sawit yang punya kebun ya yang punya kebun punya pabrik itu juga minta datanya, yang punya pabrik tapi nggak punya kebun PKS nonkebun saya juga minta datanya tapi sekaligus ini lokasinya Pak ya kabupaten di mana, kecamatan mana.

Kemudian juga yang punya kebun punya PKS supaya kita pengen telusuri ini ya telusuri pabrik ini ada di mana saja dan kenapa terjadi masalah kan gitu. Nanti data itu yang kita penting Pak, kita akan dalam Pak. Kenapa, saya ada indikasi banyak kebun yang justru bikin bikin pabrik di dekat perbatasan, perbatasan apa maksudnya kan gitu Pak ya. Nah saya pengen tahu di perbatasan kita ini apa ada kebun-kebun kelapa sawit punya punya PKS PKS nggak, atau nggak punya kebun tapi ada PKS nya di dekat-dekat perbatasan. Saya pengen tahu titiknya dulu biar ini isu ini tidak jadi liar, kalau memang betul kita akan telusuri kenapa bikin pabrik di dekat perbatasan, apa maksud kan gitu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya itu menohok, memang banyak Pak. Kebetulan beliau ini Kalimantan Tengah, kalau saya Kalimantan Barat Pak, cuman kalau urusan sawit-sawit ini kalau ndak orang Sumatera ya orang Kalimantan, wilayahnya sana-sana itu. Itu memang banyak tuh Pak, indikasi, ini kita mengatakan indikasi. Mereka sengaja bangun pabrik di perbatasan supaya bisa dapat 2 kesempatan bisa di dorong ke negara tetangga, bisa di dorong juga ke dalam. Nah itu di indikasikan, nah makanya itu juga menjadi salah satu apa sorotan juga tadi yang disampaikan, kan ini terjadi banyak di beberapa wilayah di Kalimantan karena kebetulan kan kita selain memang produsen sawit semua di sana, kita berbatasan juga tuh dengan negara-negara tetangga tuh ada Malaysia di situ, ada Brunei di situ, ya kurang lebih seperti itulah makanya itu tadi menyambung.

Ya dari GAPKI coba Pak, silahkan sampaikan aja Pak apa yang menjadi keluh kesah Bapak, apa yang menjadi kesedihan Bapak misalnya begitu selama berjalan menjadi pengusaha sawit ya kan. Kalau sedih nanti saya apa kita kasih hiburan sedikit buat Bapak.

KETUM GAPKI (JOKO SUPRIYONO):

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Habis GAPKI kita ke Petani ya biar ikut menyampaikan juga.

KETUM GAPKI (JOKO SUPRIYONO):

Baik, terima kasih.

Selamat sore,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati Pimpinan Sidang,
Pimpinan Komisi VII DPR beserta anggota Komisi VII yang mulia.

Perkenalkan nama saya Joko Supriyono, saya Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau disingkat GAPKI. Jadi GAPKI ini lahir tahun 1981.

KETUA RAPAT:

Beda setahun sama saya Pak.

KETUM GAPKI (JOKO SUPRIYONO):

Ya.

KETUA RAPAT:

Udah dewasa berarti Bapak ya.

KETUM GAPKI (JOKO SUPRIYONO):

Asal asal muasalnya dulu didirikan di Medan karena memang kan kebun kelapa sawit dulu sejarahnya kan di mulai dari Sumatera Utara ya kemudian sekarang kantornya berpindah di Jakarta dan kita memiliki 13 cabang terutama di sentra-sentra perkebunan sawit.

Bapak/Ibu sekalian,

Anggota GAPKI itu adalah pada dasarnya adalah pekebun dan produsen CPO. Jadi ada ada dua kelompok, yang pertama, anggota GAPKI terhadap perusahaan perkebunan ya yang tidak punya PKS. Jadi kita itu membatasi bahwa minimal itu punya 200 hektar berbadan hukum, itu adalah anggota GAPKI. Jadi banyak anggota GAPKI yang tidak punya PKS ada 1.000 hektar, 3.000 hektar, bahkan ada yang 500 hektar.

Kelompok kedua adalah perusahaan perkebunan yang punya PKS, nah itu biasanya kan kebunnya luas ya minimal kan 6.000 itu satu PKS, tapi ada yang puluhan ribu. Jadi ada dua kelompok anggota GAPKI itu adalah perusahaan perkebunan yang tidak punya PKS dan perusahaan perkebunan yang punya PKS.

Jumlah anggota GAPKI saat ini adalah sekitar 700 perusahaan dan itu tidak semua perusahaan menjadi anggota GAPKI karena keanggotaan asosiasi ini adalah **refinery**. Kira-kira kita juga tidak pernah tahu sebenarnya perusahaan perkebunan itu semua berapa karena memang kan tidak ada datanya yang persis yang kita bisa anggap *valid* tapi kira-kira itu ada yang mengatakan bahwa 700 itu kira-kira 30% lebih dikitlah 35% dari seluruh perusahaan. Karena memang kita juga tidak tahu banyak perusahaan yang belum beroperasi sudah punya nama dan segala macam itu. Jadi 700 anggota GAPKI itu kira-kira sekitar 30%-an dari total nasional, itu yang pertama.

Yang kedua adalah dalam konteks tadi yang dijelaskan oleh Pak Dirjen bahwa kalau kita lihat tadi *supply chain* atau rantai pasok sebenarnya kan di kelapa sawit itu rantai pasoknya kan yang paling hulu itu adalah petani ya, petani kemudian juga perkebunan yang tidak punya PKS, kemudian PKS, PKS ini kemudian ke *refinery* ya, *refinery* ini kemudian ke minyak goreng sebenarnya. Jadi ada *refinery* yang memproduksi minyak goreng, ada *refinery* yang tidak berorientasi minyak goreng. Jadi *refinery* minyak goreng baru distribusi baru konsumen.

Oleh karena itu sebenarnya dalam konteks yang dijelaskan oleh Pak Dirjen tadi, anggota GAPKI sebagai produsen TBS maupun produsen CPO adalah bagian dari rantai pasok industri kelapa sawit nasional. Nah kalau misalnya kita bicara kemudian produksi, maka selalu kita mengatakan Indonesia itu adalah memproduksi 2 macam, 1 adalah CPO, 1 adalah PKO.

Jadi PKO itu yang *kernel*-nya Pak, jadi itu jadi kalau kita bicara produksi Indonesia berapa itu ceritanya, produksi apa.

Kalau produksi CPO saja misalnya tahun 2021 itu adalah 47 juta ton tapi ada kernel atau CPKO namanya itu adalah itu.

F-PKS (Ir. H. TIFATUL SEMBIRING):

Cangkang, cangkang.

KETUM GAPKI (JOKO SUPRIYONO):

Bukan, dalamnya cangkang.

F-PKS (Ir. H. TIFATUL SEMBIRING):

Ada lagi.

KETUM GAPKI (JOKO SUPRIYONO):

Jadi sebenarnya, jadi kalau digambarkan itu adalah yang paling dalam itu adalah kernel. Nah *kernel* ini menjadi CPKO.

KETUA RAPAT:

Mbak kalau yang Mbak ini yang mana Mbak, yang dalamnya itu.

PENGUSAHA CANGKANG SAWIT INDONESIA (YUSTISIA DIBRINA):

Kalau saya yang cangkang sawitnya Pak.

KETUM GAPKI (JOKO SUPRIYONO):

Yang bungkus *kernel*.

KETUA RAPAT:

Oh Mbak cangkangnya.

KETUM GAPKI (JOKO SUPRIYONO):

Jadi yang bungkus *kernel* itu namanya cangkang.

ANGGOTA KOMISI VII :

Itu yang kayak kelapa kecil itu ya Pak ya.

KETUM GAPKI (JOKO SUPRIYONO):

Iya.

ANGGOTA KOMISI VII:

Kayak kelapa kecil dalamnya.

KETUM GAPKI (JOKO SUPRIYONO):

Betul.

Jadi yang paling dalam itu adalah *kernel*, yang bungkus *kernel* itu adalah cangkang, di luar cangkang itu kalau orang Jawa bilang sepet, nah itu yang menjadi CPO gitu jadi. Nah itu jadi kalau Indonesia sebagai contoh ini tahun 2021 produksi CPKO-nya 4,4 juta, produksi CPO-nya 46,8 juta. Jadi kalau kitanya ngomong CPO 44 juta ton tapi kalau ngomong *palm product* CPO dan CPKO adalah 51 juta ton. Jadi ini untuk memberikan gambaran Indonesia.

KETUA RAPAT:

Oh iya sebelum Bapak lanjut sedikit ini interaktif biar nggak salah. Yang Bapak buat di neraca tadi Pak Dirjen itu CPO itu yang dimaksud apa CPKO atau CPO, CPO, 52 juta. Itu yang tadi Bapak pakai CPO dan CPKO ya.

KETUM GAPKI (JOKO SUPRIYONO):

Ya.

KETUA RAPAT:

Nah kalau CPKO tadi berapa Pak.

KETUM GAPKI (JOKO SUPRIYONO):

4,4.

KETUA RAPAT:

Oh 4,4 juta.

KETUM GAPKI (JOKO SUPRIYONO):

Ya itu tahun lalu ya.

ANGGOTA KOMISI VII:

Ini interupsi dikit Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya apa CPKO itu kira-kira apa *kernel* tadi apa namanya.

KETUM GAPKI (JOKO SUPRIYONO):

Betul, jadi *kernel* itu.

ANGGOTA KOMISI VII:

Bentar tunggu sebentar Pak, itu berapa persen biasanya kalau dibandingkan, ini produk minyak juga itu ya. berapa persen dari kalau dari CPO itu dia angkanya berapa persen gitu.

KETUM GAPKI (JOKO SUPRIYONO):

Ya, jadi gini. Kalau *kernel* itu adalah bagian padat yang paling dalam itu dan itu di olah menjadi minyak namanya minyaknya CPKO. Nah *kernel* itu sendiri itu adalah kita bilang rendemen, kalau CPO itu kan kira-kira 20%, kalau *kernel* itu 4% Pak kira-kira, ya kecil Pak.

Oke, jadi ini dari segi produksi.

Kemudian kalau kita bicara berkaitan dengan aliran dari CPO ini ke mana, CPO dan CPKO ini ke mana, itu adalah pasti adalah ke ekspor dan ke domestik. Nah jadi kalau kita lihat sebenarnya di data berikutnya coba, nah kebablasan, nah ini. Nah Jadi kalau sebenarnya kalau larinya kemana barang itu, kalau untuk dalam negeri, jadi kegunaan dalam negeri itu mudah-mudahan nyambung dengan Pak Dirjen. Itu kira-kira 18 juta ton tahun lalu dan itu untuk apa saja, itu adalah untuk yang pertama adalah untuk pangan itu yang sekitar hampir 9 juta ton. Kemudian untuk bio diesel itu 7,3 juta ton dan untuk oleokimia itu 2,7 juta ton.

Jadi oleokimia ini sebenarnya sebagian besar bahan bakunya dari CPKO tadi gitu makanya, jadi makanya CPKO dan CPO tuh harus di jadikan satu supaya kita buat neracanya itu nanti kalau gitu. Jadi *oleochemical* ini yang banyak di proses dari CPKO. Jadi ini kira-kira domestiknya, jadi domestik ini memang mengalami tren naik terutama karena bio diesel ya, kalau untuk pangan itu relatif stabil lah kan karena konsumsi perkapitanya nggak-nggak banyak berubah, nah ini konsumsi untuk domestik.

Nah kemudian naik coba, nah ini kemudian ekspor. Nah ekspor kita itu sebenarnya 34 juta tahun lalu, artinya bahwa sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri itu yang cuman 18 juta itu surplus kita masih besar. Oleh karena mau tidak mau bahwa pasar sawit Indonesia itu lebih besar ekspornya, itu karena yang menghasilkan devisa segala macam itu.

Jadi ini lah kira-kira komposisi surplus produksi Indonesia yang diekspor dan itu dalam bentuk macam-macam itu terutama yang paling besar adalah yang tadi disampaikan Pak Dirjen yang kuning *orange* itu dalam bentuk olahan. Jadi ini ini itemnya tidak persis sama dengan Pak Dirjen tapi kira-kira secara garis besar bahwa yang *orange* itu adalah olahan ya olahan dari CPO ya kemudian ada yang olahan dari CPKO, kemudian yang hijau itu adalah

oleochemical, kemudian yang berikutnya lagi adalah yang biru itu adalah yang *crude* yang dalam bentuk CPO-nya.

Jadi, tadi Pak Dirjen sampaikan bahwa produk kita yang diekspor dalam bentuk yang *crude* atau mentah itu ya tinggal sedikit tinggal CPO itu saja, selebihnya sudah diolah dalam bentuk olahan CPO maupun olahan.

KETUA RAPAT:

Ya, jadi secara tidak langsung Bapak udah mengatakan praktek hilirisasi di industri kelapa sawit itu sudah agak *advanced*-lah gitu.

KETUM GAPKI (JOKO SUPRIYONO):

Yes, yes, itu Pak jadi itu yang itu yang kira-kira mungkin berkaitan dengan *performance* atau kinerja sawit Indonesia. Jadi sekali lagi, bahwa dalam kaitan dengan minyak goreng sebenarnya bahan baku ya berupa CPO maupun setelah di *refine* baik dalam bentuk RBD *palm oil* maupun RBD *palm olein* sebenarnya dari sisi *supply* bahan baku itu adalah tidak masalah. Nah, tinggal bagaimana kemudian mengatur alokasi domestik untuk bahan baku minyak goreng ini dari aspek distribusi maupun tata niaganya, saya pikir itu yang paling penting, terima kasih.

Selamat sore,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ya saya pikir nanti dulu tanggapannya ya, kita lempar dulu satu lagi nih masing-masing nih. Silahkan Pak dari Petani Pak, Petani Perjuangan.

KETUM ASOSIASI PETANI PERJUANGAN:

Baik, terima kasih Pimpinan.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi VII,
Yang kami hormati anggota DPR RI dari Komisi VII,
Bapak Dirjen Agro Kementerian Perindustrian yang hadir pada kesempatan ini,
Teman-teman dari Asosiasi, GAPKI yang hadir,
GIMNI dan SPKS.

Selamat siang salam sejahtera bagi kita semua.

Pertama-tama kami dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Pimpinan, ingin menyampaikan pada kesempatan hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada dalam hal ini pemerintah terkait pencabutan larangan ekspor yang pada kemarin tanggal 23 itu sudah resmi dicabut. Jadi dengan dicabut kebijakan larangan tersebut *alhamdulillah* harga TBS ditingkat petani sudah

mulai ada perubahan, yang sebelumnya harga sebelum ada belakangan ini 3.600, 3.800, turun 50% tinggal 1.600. Nah, *alhamdulillah* hari ini sudah mengalami kenaikan ada 400 sampai 600 rupiah di tingkat petani, rata-rata harga di provinsi ada menyentuh angka 2.300 sampai 2.400 dengan dicabutnya kebijakan tersebut.

Selanjutnya ingin kami menyampaikan bahwa perlu kami sampaikan perkebunan sawit Indonesia pada saat ini kita ketahui ada 16 juta hektar total Pak Pimpinan. Dari 16 juta hektar itu 40%-nya adalah perkebunan rakyat, jadi 60% nya.

KETUA RAPAT:

Sedikit dulu Pak saya selak dikit, yang di maksud perkebunan rakyat ini pakai sistem plasma intiplasma itu.

KETUM ASOSIASI PETANI PERJUANGAN:

Salah satunya tergabung Pak, jadi.

KETUA RAPAT:

Oh masuk semua lagi.

KETUM ASOSIASI PETANI PERJUANGAN:

Masuk semua iya akumulasinya 40-41%.

KETUA RAPAT:

Oke, ada lagi Pak yang kedua. Berarti bedanya Bapak-Bapak kan ini kan sebetulnya kalau dibilang dengan GAP gini hampir mirip-mirip kan, cuman mungkin kalau yang GAP gini bisa saya bilang dia berbadan usaha, kalau Bapak-Bapak petani ini ndak gitu, gimana Pak.

KETUM ASOSIASI PETANI PERJUANGAN:

Iya betul.

KETUA RAPAT:

Oke.

KETUM ASOSIASI PETANI PERJUANGAN:

Jadi 40% itu ada petani swadaya, ada petani plasma, yang mereka tidak tergabung di dalam apa nama tuh perusahaan, disitu berarti petani. Kalau kita akumulasikan 41% ada 6,8 juta hektar milik kita petani. Nah untuk itu, kalau kita melihat jumlah PKS yang ada di Indonesia berdasarkan data yang kami

miliki ada 1.118 unit PKS tersebar di 146 kabupaten, mulai dari kapasitas 30,60, sampai 90 ton, jadi rata-rata 45 ton.

Nah yang kami hadapi saat ini Pak Pimpinan, pertama, walaupun pelarangan tadi sudah dicabut itu harga TBS belum semuanya terserap oleh PKS yang ada di daerah-daerah tersebut. Terutama kami masih dapat laporan dari daerah perwakilan kami di setiap provinsi, ada PKS yang menerapkan sistem kota, jadi tidak semuanya seluruh TBS petani itu beli oleh PKS.

Selanjutnya harga pupuk yang sampai hari ini cenderung meningkat. Jadi TBS jatuh ditambah lagi harga pupuk sedikitpun belum ada mengalami penurunan harga. Di samping itu lagi faktanya Pimpinan walaupun harganya tinggi harga pupuk, barangnya tidak tersedia di tempat. Nah itu mungkin secara singkat kami sampaikan gambaran problem-problem yang ada di petani. Selanjutnya mungkin teman kami dari SPKS bisa menambah, silahkan.

Terima kasih waktunya Bapak Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam Warahmatullah Wabarakatuh.

Silahkan Pak.

KETUM SPKS:

Terima kasih Pak Pimpinan.

Bapak Pimpinan,
Pimpinan sidang yang saya hormati, dan beserta
Seluruh tim yang ada di Komisi VII, dan juga berbagai Asosiasi yang ada yang hadir.

Pertama, saya ada beberapa poin Pak karena ini udah mau jam 4 saya mempersingkat saja. Kalau terkait dengan minyak goreng, kami sebenarnya nggak tahu sama sekali, kami itu hanya tahu soal kebun kami dan juga TBS kami dan dijual ke mana. Kalau ke mana TBS kami kemudian diolah oleh pabrik menjadi CPO Kemudian dari CPO itu untuk di olah lagi bio diesel kah, ke luar negeri kah, atau misalnya ke minyak goreng, kami nggak tahu karena kami itu hanya berhubungan dengan pabrik kelapa sawit yang ada di sekitar kebun kami, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, saya melanjutkan tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Pimpinan dari APKAS Indo Perjuangan, petani ini kan ada tadi mau menjawab juga tadi pertanyaan Bapak Pimpinan yang membedakan antara Asosiasi Pengusaha dan juga petani sawit itu pada skala luasan Pak. Kalau lebih dari 25 hektar itu, itu wajib punya izin bahkan harus punya HGU pada luasan kalau tidak salah 200 hektar. Tetapi kalau di bawah 25 Ha itu cukup saja

Surat Tanda Daftar Budidaya, ah STDB namanya Pak, ini mungkin di Komisi lain lah atau di Komisi IV kali yang mungkin memahami konteks teknisnya.

Kita tahu juga tadi udah disampaikan dari 16,7 juta hektar itu luas kebun sawit Indonesia, kebun rakyat itu kan kurang lebih ada kurang lebih 6,7 juta hektar, ini dari data Direktorat Jenderal perkebunan Bapak-bapak Pimpinan dan petani swadaya itu mayoritas. Bapak dari Kalimantan Barat dan juga basis-basis saya itu ada di 3 kabupaten, Sanggau, Sekadau, dan juga Sintang dan rata-rata petaninya skala kecil. Dan petani plasma itu konteks *supply chain* nya itu jelas mereka itu punya kemitraan dan memang dari awal itu sudah bermitra dengan perusahaan perkebunan, mulai dari proses pembangunan, proses pembiayaannya juga, itu di asistensi atau fasilitasi oleh pelaku usaha.

Tetapi kalau yang namanya pekebun swadaya yang skala kecil itu, itu apa rantai *supply*-nya itu itu berbelit-belit Pak jual ke tengkulak, jual ke ram, jual ke CV dan harganya itu berbeda dengan harga yang ditetapkan oleh tim penetapan harga buah sawit di provinsi. Nah seperti kemarin itu Bapak Pimpinan dan semua yang ada. Harga 3.600 untuk petani plasma tetapi harga di petani swadaya itu 50% di bawahnya, memang belum ada payung hukum soal perlindungan harga ataupun proses penentuan harga untuk apa untuk petani swadaya dan harapan kami di Komisi VII sebenarnya kami ingin sekali ada ekosistem yang utuh Pak, dalam konteks *supply chain* tadi. Petani itu bisa mengetahui jual ke mana untuk produk apa buah sawit yang di panen itu.

Jadi kalau misalnya saya menganalisis kemarin Pak karena memang stok ekspor CPO memang nampaknya ke petani, pertanyaan dari anggota saya itu loh kok harga saya turun, dan jawaban kami apa, ya karena ekspor CPO-nya di hentikan. Lah kami kan nggak tahu itu, kan ada bio diesel untuk dalam negeri, minyak goreng kan dalam negeri, kenapa buah saya nggak ke situ aja sebagai bagian dari proteksi pemerintah, untuk bio diesel kan kurang lebih 9,4 juta kiloliter untuk bio untuk minyak goreng tadi tadi udah mungkin dijelaskan. Kenapa kemudian untuk produk dalam negeri nggak dari petani sawit skala kecil aja Pak sebagai proses perlindungan negara terhadap petani dari gejolak harga pasar.

Saya kira itu aja Bapak Pimpinan, mungkin butuh juga apa kami butuh ekosistem yang utuh, ada kemitraan dengan industri dengan GAPKI mungkin itu perlu di fasilitasi kemitraannya dengan anggota-anggota GAPKI, dengan petani-petani kecil itu memang aturannya juga demikian, pelaku usaha wajib membeli buah dari petani sawit melalui kelembagaan perkebunan, mungkin ini perlu di apa difasilitasi sehingga ada ekosistem yang utuh begitu. Kurang lebih begitu Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya secara prinsip bisa di tangkap dan di pahami Pak memang. Memang apa yang Bapak perlukan itu menjadi santapan sarapan pagi saya selama kurang lebih hampir 1 bulan setengah, karena dapil saya Kalimantan Barat itu banyak sekali kelapa sawit. Yang komplain sama saya bukan hanya asosiasi,

sampai se keluarga-keluarga saya yang dia nanam modal cuma model 6 hektar 7 hektar itu ngomel semua marah semua memang.

Jadi bahkan yang teman-teman anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, itu kan salah satu mata pencaharian mereka ini kan nanam-nanam kayak beginian aja 3 hektar, ada dia punya duit sedikit dia belilah 8 hektar, gitu-gitu lah kurang lebih. Ya jadi, namun *alhamdulillah* saya sudah bisa bangun pagi dengan tenang dan nyenyak Pak, agak tenanglah minimal karena ekspornya sudah di buka. Ya artinya, cuman memang saya tangkap tadi Pak pesan Bapak bahwa bagaimana mensinkronisasikan dan dibangun sebuah ekosistem bisnis kelapa sawit yang *sustain* sebenarnya. Sebetulnya kita butuh ini kan kepastian jaminan yang *sustainable* dan lain sebagainya, kan gitu, begitu Pak ya.

Di cocok Pak saya jadi serikat petani itu cocok Pak.

Oke, selanjutnya, saya pikir saya coba kasih waktu aja ya berapa. Saya hanya ingin sekalian mendengar dari masing-masing ini, yang mana tadi GEMIN, GEMINI.

ASOSIASI GIMNI (MANUPAK MANURUNG):

GIMNI, GIMNI Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ah GEMINI.

ASOSIASI GIMNI (MANUPAK MANURUNG):

GIMNI.

KETUA RAPAT:

GIMNI ya, Gabungan Minyak Nabati.

ASOSIASI GIMNI (MANUPAK MANURUNG):

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia.

KETUA RAPAT:

Iya, Bapak jelaskanlah Pak seperti apa binatang GIMNI ini.

ASOSIASI GIMNI (MANUPAK MANURUNG):

Ya siap.

Terima kasih Pak Pimpinan.

Yang terhormat Pak Pimpinan rapat,
Anggota dewan yang saya hormati,
Pak Dirjen dan para Ketua Asosiasi yang saya hormati.

Perkenalkan nama saya Manupak Manurung Pak, saya salah satu Ketua bidang di GIMNI, kebetulan membidangi Asosiasi membidang kelembagaan.

KETUA RAPAT:

Bapak bidang sendiri aja nggak hafal, kebanyakan ngurusin minyak nabati Bapak nih kayaknya.

ASOSIASI GIMNI (MANUPAK MANURUNG):

Iya Pak iya Pak.

Nah, kami sendiri memiliki anggota sebanyak 37 perusahaan Pak, 37 perusahaan ini adalah industri yang memang benar-benar industri *refinery* seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen dengan total kapasitas 1 tahun itu kurang lebih sekitar 35 juta ton per tahun, kapasitas olah. Kami berada di beberapa lokasi di Sumatera, di Jawa, dan di Kalimantan, tetapi pada umumnya tersentral di daerah-daerah yang punya kepelabuhanan Pak seperti.

KETUA RAPAT:

Sorry Pak sebentar, Bapak punya kapasitas olahan 35 juta ton per tahun.

ASOSIASI GIMNI (MANUPAK MANURUNG):

Setahun Pak.

KETUA RAPAT:

GAPKI tadi berapa iya.

GAPKI (GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT INDONESIA):

Kalau CPO Indonesia kan tadi 47 juta ton.

KETUA RAPAT:

Oh artinya Bapak ini mengolah yang punya si GAPKI inilah menjadikan minyak nabati ya.

ASOSIASI GIMNI (MANUPAK MANURUNG):

Iya.

KETUA RAPAT:

Oke.

ASOSIASI GIMNI (MANUPAK MANURUNG):

Jadi tersebar di beberapa Provinsi tetapi umumnya itu yang saya sampaikan tadi, kita berlokasi di wilayah yang punya akses ke pelabuhanan karena mobilitas barang bahan baku yang kita dapat dari lokasi-lokasi yang di Sumatera dan Kalimantan itu kemudian kita olah dan pada umumnya kita ekspor lewat laut, itu dia Pak.

Terkait soal gonjang ganjing minyak goreng, tadi Pak Dirjen sudah sampaikan, tadi Pak Tifatul juga sudah sampaikan bahwa isu ini kan sebenarnya dari akhir tahun 2020/2021 sudah mengerucut kemudian ditangani oleh Kementerian terkait dalam hal ini Kemendag dan per 15 atau 16 Maret kemudian ditangani oleh Kemenperin. Kami sebagai pelaku usaha tentu bisa merasakan suasananya ketika kami harus dibina oleh kawan-kawan dari Kementerian Perdagangan dan ketika kami dibina oleh Kementerian Perindustrian. Satu hal yang membedakan adalah.

KETUA RAPAT:

Enakan mana Pak, di bina sama Kemendag atau di bina sama Kemenperin.

ASOSIASI GIMNI (MANUPAK MANURUNG):

Dua-duanya enak Pak.

KETUA RAPAT:

Atau di binasakan enaknya.

ASOSIASI GIMNI (MANUPAK MANURUNG):

Tetapi ini Pak.

ANGGOTA KOMISI VII:

Nggak berani jawab dia Pak Ketua.

ASOSIASI GIMNI (MANUPAK MANURUNG):

Tetapi begini yang bisa kami sampaikan bahwa Kementerian Perindustrian itu benar-benar lah Bapak pembina industri kami.

KETUA RAPAT:

Yang benar sikit Pak.

ASOSIASI GIMNI (MANUPAK MANURUNG):

Bukan Pak.

KETUA RAPAT:

Nanti Bapak di Kemendag Bapak bilang enak di sana juga.

ANGGOTA KOMISI VII:

Manurung ini paling pintar dia Pak.

KETUA RAPAT:

Pak Manurung.

ASOSIASI GIMNI (MANUPAK MANURUNG):

Nah itu dia Pak, hal itu bisa kita lihat sebenarnya dari *output*-nya Pak ya. Tadi Bapak juga sudah mengapresiasi bagaimana kinerja di Kemenperin, bagaimana ya itu tadi. Menurut pendapat saya Kemenperin sebagai Bapak angkat kami kemudian memanggil seluruh *stakeholders* Pak, satgas pangan yang kita tahu adalah kepolisian juga langsung *incharge full* terlibat sehingga ya ada juga pengaruhnya polisi, Pak. Ketika sehingga ketika kita misalnya memulai komitmen untuk *supply* dan lain-lain itu ya tidak ada yang dalam tanda kutip bermain-mainlah.

Jadi dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih walaupun sampai pada 31 Mei, tetapi harapan kami adalah begini, per tanggal 31 Mei kan jadinya ada 3 *platform* ya kalau berdasarkan sosialisasi Kemendag kemarin. Ada 3 *platform*, *platform* pertama itu adalah yang Guruh oleh Indomarco swasta, kemudian Warung Pangan oleh BUMN, dan yang ketiga adalah Simirah. Menurut hemat kami dari 3 ini yang paling apa namanya yang paling kami bisa rasakan manfaatnya adalah Simirah, terutama karena Simirah kami sudah *incharge*. Kalau yang 2 tadi kan berarti kan harus melakukan nego ulang Pak dengan mereka.

KETUA RAPAT:

Karena namanya Simirah aja, kalau namanya Sibadu saya rasa Bapak ndak ini kayaknya.

ASOSIASI GIMNI (MANUPAK MANURUNG):

Itu dia Pak, jadi harapan kami adalah ini ke Pak Dirjen kami sampaikan. Mohon Simirah nya tetap dilanjutkan, kenapa, karena Simirah ini adalah juga mengakomodir kami punya distributor biasa. Kalau yang tadi itu kan itu memang distributor murni mereka Pak, jadi apa namanya ketika distributor yang sudah biasa berjualan minyak goreng itu tetap diberdayakan menurut

hemat kami penyalurannya akan lebih lancar, ketimbang memaksakan 2 yang tadi itu Pak, saya tidak yakin tapi ya.

KETUA RAPAT:

2 yang mana 2 yang mana.

ASOSIASI GIMNI (MANUPAK MANURUNG):

Kan tadi ada Gurih oleh Indomarco, kemudian ada Warung Pangan oleh.

KETUA RAPAT:

Oh itu *platform*.

ASOSIASI GIMNI (MANUPAK MANURUNG):

Iya Pak.

KETUA RAPAT:

Yang kayak model Simirah itu.

ASOSIASI GIMNI (MANUPAK MANURUNG):

Iya Pak.

KETUA RAPAT:

Itu yang buat siapa.

ASOSIASI GIMNI (MANUPAK MANURUNG):

Yang buat yang swasta bikin sendiri, Indomarco itu grupnya Salim, kalau yang Warung Pangan itu grupnya RNI.

KETUA RAPAT:

Apa.

ASOSIASI GIMNI (MANUPAK MANURUNG):

ID Food.

KETUA RAPAT:

Pasti bekerja berdasarkan kepentingan mereka masing-masing lah.

ASOSIASI GIMNI (MANUPAK MANURUNG):

Nah 3 3 *platform* ini adalah *platform* yang memang *traceable*, artinya kalau kami mengirim minyak seperti yang tadi Pak Dirjen sampaikan. Kami kirim minyak ke distributor satu, distributor satu kasih ke D2 atau langsung ke pengecer, kemudian pengecer menjualnya ke *customer* atau ke pembeli, itu juga bisa di *trace* Pak karena pada akhirnya pembeli itu memang ya itu tadi, dia akan beli dengan identitas NIK, dia harus *scan* KTP-nya, jadi akan terlihat Pak.

Nah dua *platform* diatas sebenarnya itu sudah jalan, nah yang Simirah karena sistemnya kemarin masih berbasis sampai ke pengecer, memang KTP itu belum di munculkan, tetapi bisa. Jadi kami berharap karena ujungnya adalah KTP yang pembeli yang akan jadi dasar bagi kami untuk mengklaim persetujuan ekspor, kami berharap Simirah itu tetap dilanjutkan.

Itu saja untuk sementara Pak Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ini nggak ada pesan sponsor dari Pak Dirjen nih.

ASOSIASI GIMNI (MANUPAK MANURUNG):

Tidak Pak tidak tidak sama sekali.

KETUA RAPAT:

Memang ini Simirah lagi seksi nih, lagi jadi lagi seksi sekali lah, luar biasa memang Simirah nih.

Selanjutnya apa ini, minyak jelantah, Ekportir Minyak Jelantah nih baru sekali ini saya tahu ada minyak jelantah ini di eksportir. Betul Pak, ndak saya tuh ingat dulu zaman zaman saya kecil itu saya suka Pak, itu nyaman itu kalau nasi agak panas pakai ikan asin ikan belida itu. Nah, kita kasih kuahnya dikit aja minyak jelantah tapi minyak jelantah yang bekas goreng-goreng ikan itu.

KETUM ASOSIASI EKSPORTIR MINYAK JELANTAH:

Nggak itu takutnya nanti imun tubuhnya turun Pak.

KETUA RAPAT:

Tapi sekarang saya nggak apa-apa, ya silahkan Pak. Nah itu tolong Bapak jelaskan minyak jelantah yang macam mana Pak.

KETUM ASOSIASI EKSPORTIR MINYAK JELANTAH:

Oke.

Terima kasih Pak Pimpinan atas waktunya,
Terima kasih juga untuk seluruh anggota Komisi VII, juga dengan Pak Dirjen Agro Pak Putu terima kasih.

Sebelumnya saya juga mau mengapresiasi untuk Simirah soalnya dari awal Simirah ada ...(suara tidak jelas)... selalu hadir untuk ...(suara tidak jelas)...nya keliatannya memang Simirah ini bagus.

KETUA RAPAT:

Di buka sikit Pak masker Pak, biar saya melihat ketampanan wajah Bapaknya, nah gitu Pak mantap Pak.

KETUM ASOSIASI EKSPORTIR MINYAK JELANTAH:

Simirah ini katanya memang bagus dan mungkin harus memang di pertahankan Pak soalnya Pak dari sisi *traceability* nya saya lihat memang luar biasa bagusnya sampai detail per daerah per Kota, itu sampau ada namanya stok stok yang tersedia maupun stok yang kekurangan gitu. Jadi saya rasa luar biasa kalau dari sistem informatikanya gitu.

Lalu izinkan Pak, kita mau berkeluh kesah Pak atas kejadian yang belakangan ini terjadi. Kita ini pengusaha *use cooking oil* Pak, minyak goreng jelantah itu kita ngumpulkannya Pak, *liter by liter* Pak dari bukan dari buah ya dan kita ini dari restoran, dari pedagang kaki lima, mungkin pecel lele, hotel-hotel, dan lain sebagainya itu Pak. Jadi kita ini sudah membantu Pak pemerintah untuk meringankan beban masyarakat kita dengan kita membeli minyak jelantahnya.

Minyak jelantah ini Pak biasanya kalau kita lihat dari statistika yang kita punya milikin Pak, itu setiap manusia ini kalau minyak gorengnya dia pakai 1 liter itu dia 35% nya minyak jelantah Pak. Itu kalau udah pakainya berulang-ulang gitu sampai hitam warnanya. Kalau biasanya kita kita mungkin kalau Bapak mungkin porsinya bisa 70% itu udah jadi jelantah Pak. Jadi kita ini termasuk salah satu yang membantu meringankan beban pemerintah Pak dari pencemaran lingkungan, lalu dari biaya hidup, lalu dari kesehatan, dan juga tingkat kepandaian sumber daya manusia kita Pak, semakin kita sehat *Insy* Allah kita punya sumber daya manusia semakin pintar Pak. Jadi

KETUA RAPAT:

Pak berapa Bapak ambil minyak jelantah itu dari para pedagang-pedagang di bawah itu Pak.

KETUM ASOSIASI EKSPORTIR MINYAK JELANTAH:

Kita sekarang posisinya Pak karena ada HET kita belinya posisinya selalu di HET Pak.

KETUA RAPAT:

Ya ya berapa.

KETUM ASOSIASI EKSPORTIR MINYAK JELANTAH:

14.000 per kilo Pak, harga HET sekarang 15.500, kita belinya 14.000 per kilo Pak.

KETUA RAPAT:

Bapak belinya sama petani eh apa sama pedagang-pedagang itu Pak.

KETUM ASOSIASI EKSPORTIR MINYAK JELANTAH:

Sama pengepul besar Pak.

KETUA RAPAT:

Iya sama pengepul lah gitu.

KETUM ASOSIASI EKSPORTIR MINYAK JELANTAH:

Iya, itu jadi ada pengepul besar Pak, ada restoran, ada pengepul besar, pengepul kecil. Jadi ini rantainya banyak Pak, jadi kalau kita kemarin prosesnya karena ekspornya gitu Pak, yang kasihan yang di bawah-bawah kita Pak. Di bawah kita ini ada puluhan ribu Pak manusia Pak.

KETUA RAPAT:

Oke...(suara tidak jelas)... minyak jelantah ini. Gini Pak, jadi Bapak beli HET 14.000.

KETUM ASOSIASI EKSPORTIR MINYAK JELANTAH:

Betul.

KETUA RAPAT:

Kalau produksi Bapak dalam, saya bicara satu asosiasi ya total ya. Produksi minyak jelantah itu dalam setahun berapa Pak.

KETUM ASOSIASI EKSPORTIR MINYAK JELANTAH:

Jangan bilang produksi Pak, kita nggak produksi.

KETUA RAPAT:

Ya nerima nerima.

KETUM ASOSIASI EKSPORTIR MINYAK JELANTAH:

Iya, itu kita *collect* 20.000 ton Pak.

KETUA RAPAT:

20.000 ton setahun?

KETUM ASOSIASI EKSPORTIR MINYAK JELANTAH:

Per bulan Pak.

KETUA RAPAT:

Oh per bulan.

KETUM ASOSIASI EKSPORTIR MINYAK JELANTAH:

Jadi kita per tahun 360.000 ton Pak.

KETUA RAPAT:

Bapak ekspor.

KETUM ASOSIASI EKSPORTIR MINYAK JELANTAH:

Kita ekspor Pak.

KETUA RAPAT:

Jadi apa itu minyak jelantah Pak.

KETUM ASOSIASI EKSPORTIR MINYAK JELANTAH:

HVO Pak, tadi yang di terangkan Pak Putu tadi.

KETUA RAPAT:

Jadi apa.

KETUM ASOSIASI EKSPORTIR MINYAK JELANTAH:

HVO.

KETUA RAPAT:

Apa itu Pak.

KETUM ASOSIASI EKSPORTIR MINYAK JELANTAH:

Hydrogenated Vegetable Oil, itu untuk bahan bakar jet Pak.

KETUA RAPAT:

Wih sedap keren kali.

KETUM ASOSIASI EKSPORTIR MINYAK JELANTAH:

Jadi ...*(suara tidak jelas)*... yang mau kerjakankan kan HVO juga Pak.

KETUA RAPAT:

Oh, nah terus Bapak jual ekspor berapa tuh Pak per liter.

KETUM ASOSIASI EKSPORTIR MINYAK JELANTAH:

Itu harganya fleksibel Pak naik turun Pak.

KETUA RAPAT:

Ya saya tahu harga fleksibel naik turun, cuman pengen tahu aja harga berapa.

KETUM ASOSIASI EKSPORTIR MINYAK JELANTAH:

Bagi yang terakhir kita jual di 19.000 Pak.

KETUA RAPAT:

Oh agak lumayanlah margin 5.000 ya.

KETUM ASOSIASI EKSPORTIR MINYAK JELANTAH:

Kalau kena DMO habis Pak.

KETUA RAPAT:

Maksudnya.

KETUM ASOSIASI EKSPORTIR MINYAK JELANTAH:

DMO itu kan ngambil keuntungan dari kita jual Pak, nah kita kena DMO Pak.

KETUA RAPAT:

Oh jadi nanti ...*(suara tidak jelas)*... juga.

KETUM ASOSIASI EKSPORTIR MINYAK JELANTAH:

Saya pertanyakan, kenapa kita ini di kenakan DMO padahal sudah membantu masyarakat gitu Pak.

KETUA RAPAT:

Oke, jadi Bapak nih.

KETUM ASOSIASI EKSPORTIR MINYAK JELANTAH:

Jadi kita juga bukan produksi juga kan gitu.

KETUA RAPAT:

Intinya kan begitu Pak.

KETUM ASOSIASI EKSPORTIR MINYAK JELANTAH:

Betul.

KETUA RAPAT:

Bapak ini minta aspirasinya tadi begitu, walaupun itu minyak jelantah nih jangan lah dimasukkan dalam kategori yang DMO kan gitu.

KETUM ASOSIASI EKSPORTIR MINYAK JELANTAH:

Betul Pak, jadi minta bantuan dari Komisi VII ini Pak kita Pak.

KETUA RAPAT:

Oke.

KETUM ASOSIASI EKSPORTIR MINYAK JELANTAH:

Jadi kita dari para pengepul itu banyak pertanyaan ke kita ini, kenapa kok pemerintah selalu bawa-bawa minyak jelantah ke dalam larangan ekspor gitu. Sedangkan kita ini limbah Pak yang kita *collect* dari resto-restoran, pedagang kaki lima, seperti itu Pak. Jadi kita ini bukan produksi gitu loh tapi di kenakan.

KETUA RAPAT:

Bentar Pak.

Pak Dirjen, kalau harga ekspor kita tuh minyak CPO apa yang di ekspor tuh apa, minyak ya minyak goreng kita berapa Pak, per liter.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Ya, kalau minyak goreng itu sekitar, nggak per liter.

KETUA RAPAT:

Per liter aja per liter.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Per liter ini 19.000 sampai dengan 20, gitu ya Pak ya, untuk ekspor 26.000.

KETUM ASOSIASI EKSPORTIR MINYAK JELANTAH:

Itu aja Pak kalau harga tender itu KBB itu misalnya kayak hari ini itu 12.000.

KETUA RAPAT:

Hah, nggak soalnya jangan sampai nanti kan 12.000 Pak, bisa aja kan kalau gitu saya bikin minyak Bapak ini jadi minyak jelantah.

KETUM ASOSIASI EKSPORTIR MINYAK JELANTAH:

Iya itu dia.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Itu maksudnya Pak.

KETUM ASOSIASI EKSPORTIR MINYAK JELANTAH:

Jadi jangan dibandingkan harga internasional Pak 1.600 dolar itu kira-kira 26.000. Jadi harga itu kalau di pasar internasional sekarang itu sekitar 25-26.000 per kilo, di dalam negeri itu 13.000, 14.000, 12.000 per kilo.

KETUA RAPAT:

Bukan, yang saya maksud tadi ya jangan sampai misalnya khusus nih misalnya tadi kan minta ada aspirasi nih, khusus minyak jelantah ya jangan di larang lah gitu, boleh aja. Jadi nggak usah diberlakukan DMO gitu misalnya ya. Jadi minyak jelantah boleh lah kita berangkat lah jalan-jalan dia keliling luar negeri disana, cuman tiba-tiba nanti minyak ini dimasukkan kategori dalam minyak jelantah.

KETUM ASOSIASI EKSPORTIR MINYAK JELANTAH:

Di kenakan *refi* aja Pak.

KETUA RAPAT:

Jadi ada permainan kan, apa.

KETUM ASOSIASI EKSPORTIR MINYAK JELANTAH:

Dikenakan *refi* gitu.

KETUA RAPAT:

Apa itu Pak.

KETUM ASOSIASI EKSPORTIR MINYAK JELANTAH::

Refi ekspor, pungutan ekspor, Pak.

KETUA RAPAT:

Oh, soalnya begini. Kalau saya sebagai pemain, ini kan pendekar semua ini. Ya nggak Pak, kita ini sama-sama pemain lapangan kan, oh bukan lagi pemain, pelatih juga. Jadi, apa kalau sabuk itu sabuk hitam Pak, jadi pada saat ini di buat ini nggak apa-apa tidak diberlakukan DMO, potensi bermain kana da nih karena kan ada margin.

KETUM ASOSIASI EKSPORTIR MINYAK JELANTAH:

Betul, nah gitu Pak makanya kalau dari anggota Asosiasi kita Pak itu semuanya memiliki sertifikat ICC Pak, itu *sustainable carbon credit* untuk internasional punya Pak. Jadi makanya saya tadi apresiasi program Simirah karena mereka *traceable*, yang kita kenakan di ICC ini *traceability* nya Pak, jadi.

KETUA RAPAT:

Berapa orang asosiasi yang ada di Bapak ini anggotanya.

KETUM ASOSIASI EKSPORTIR MINYAK JELANTAH:

Anggotanya 16 Pak.

KETUA RAPAT:

16.

KETUM ASOSIASI EKSPORTIR MINYAK JELANTAH:

Betul.

KETUA RAPAT:

Oh.

KETUM ASOSIASI EKSPORTIR MINYAK JELANTAH:

Jadi di ICC itu Pak setiap kali kita *collect* minyak di restoran A B C itu kita harus daftarkan Pak. Jadi kita kalau punya restoran yang *supply* ke kita sekitar 8.000 gitu Pak, itu 4.000-nya biasanya mereka *call* Pak setiap tahun Pak, di *telfonin* satu-satu apa benar ini *supply* ke kita, harganya segini, *volume*-nya segini sebulan.

KETUA RAPAT:

Oke oke, lanjut Pak.

KETUM ASOSIASI EKSPORTIR MINYAK JELANTAH:

Jadi makanya sistem *traceability* di Simirah itu mau nya sih, saya sebagai Ketua mau mencoba aplikasikan ke Asosiasi kita gitu ya biar nanti bisa jadi *report*, entah itu nanti kita di bina di Kementerian Perindustrian atau Perdagangan gitu. Makanya kita di sini coba meminta Komisi VII, apakah boleh kita di bina di Kementerian Perindustrian.

KETUA RAPAT:

Oh boleh Pak, jarang-jarang ada minta di bina sama Komisi VII nih. Oke oke, saya nangkap Pak nangkap tenang aja Pak, Bapak nanti akan kami bina. Nggak nggak, saya pikir gini Pak, saya ada cukup Pak ya saya udah nangkap. Jadi poin yang Bapak sampaikan kan bahwa tolong bahwa minyak jelantah ini jangan disamakan kategorinya dengan minyak yang lain.

KETUM ASOSIASI EKSPORTIR MINYAK JELANTAH:

Betul.

KETUA RAPAT:

Karena ini kan masuk dalam kategori limbah, bukan begitu Pak.

KETUM ASOSIASI EKSPORTIR MINYAK JELANTAH:

Betul.

KETUA RAPAT:

Nah, artinya kalau tadi minyak-minyak yang lain jenis-jenis turunan yang lain itu diberikan kewajiban DMO gitu misalnya, ya harapan Bapak khusus untuk jelantah ini tidak dimasukkan dalam kategori DMO, kan begitu Pak ya.

KETUM ASOSIASI EKSPORTIR MINYAK JELANTAH:

Betul Pak.

KETUA RAPAT:

Namun kan yang perlu kita harus obyektif aja Pak, kita harus proporsional kan. Pertanyaannya satu, yang harus kita jawab bersama dan harus kita jaga. Pada saat kita dorong ke situ Pak, khusus jelantah ini tidak ada DMO, bagaimana cara menjaga agar tidak ada pelatih-pelatih sabuk hitam ini Pak bermain di belakang, itu kan jadi tanda tanya. Nah, saya pikir nanti jawab itu nanti nggak usah kita jawab sekarang, tapi nanti itu bisa menjadi bahan diskusi bersama. Supaya jangan sampai nanti pelatih-pelatih sabuk hitam ini dia kirim barang itu berapa tangki-tangki ini kan masuk ke Bapak, misalnya lewat belaga-belaga restoran gitu Pak. Oh kategori minyak jelantah padahal itu di titipin di situ.

KETUM ASOSIASI EKSPORTIR MINYAK JELANTAH:

Betul Pak setuju Pak gitu, memang perlu di bina, Pak.

KETUA RAPAT:

Tinggal itu aja Pak yang mungkin perlu di diskusikan bersama, karena lumayan Pak marginnya, maklum ini sabuk hitam semua, Pak. Kalau saya ini kalau urusan minyak goreng masih sabuk putih Pak, jadi masih masih awam sekali kita. Berurusan sama sabuk hitam baru begini aja udah goyang kita.

KETUM ASOSIASI EKSPORTIR MINYAK JELANTAH:

Betul Pak.

KETUA RAPAT:

Oke Pak, makasih makasih. Cukup Pak ya, ada lagi.

KETUM ASOSIASI EKSPORTIR MINYAK JELANTAH:

Seumpama Pak kalau memang di izinkan kalau kita di perbolehkan untuk jual lokal, kita sebenarnya sebagai asosiasi pengennya juga diperbolehkan bisa melokal kita juga mau Pak.

KETUA RAPAT:

Jual lokal.

KETUM ASOSIASI EKSPORTIR MINYAK JELANTAH:

Iya, permasalahannya industri yang menyerap sampai saat ini masih belum ada, tapi saya dengar Pertamina nanti mau bikin HVO Pak. Mungkin kalau memang mereka masih belum punya alat untuk me-*refine* minyak goreng bekas ini, kita memiliki ide kalau di *blending* Pak, jadi ndak perlu di...(suara tidak jelas)...tapi di *blending* bisa Pak.

KETUA RAPAT:

Saya punya cerita ada cerita studi kasus di zaman saya kuliah Pak, itu di jurusan Teknik Mesin. Saya Trisakti dia udah bisa buat mobil itu bahan bakar minyak jelantah, ini mungkin kali salah satunya.

KETUM ASOSIASI EKSPORTIR MINYAK JELANTAH:

Betul Pak bio diesel itu Pak.

KETUA RAPAT:

Jadi, pengembangannya ya.

KETUM ASOSIASI EKSPORTIR MINYAK JELANTAH:

Iya mungkin itu pengembangannya Pak.

KETUA RAPAT:

Oke, gini aja Pak. Saya pikir itu nanti bisa menjadi pembahasan lebih lanjut tapi nggak mungkin kita bahas tuntas disini karena nanti bisa.

Oh ya selamat datang Pak Pimpinan. Ini Bapak Ketua Komisi Pak, Pak Sugeng dari Partai Nasdem. Partai Nasdem ini koalisi sejati dengan PKB, Pak.

Ya jadi itu, jadi cukup Pak ya.

KETUM ASOSIASI EKSPORTIR MINYAK JELANTAH:

Sudah Pak cukup, Pak.

KETUA RAPAT:

Saya pikir kita udah tangkap Pak, nanti akan nanti kita agendakan khusus aja Pak, pembahasan mengenai minyak jelantah ini.

Selanjutnya apa lagi nih, ah cangkang cangkang. Ya cangkang ya, ya cangkang mana cangkang 5 menit aja Pak, ya walaupun memang dari semua memaparkan tadi paling cantik Mbak lah hari ini.

PENGUSAHA CANGKANG SAWIT INDONESIA (YUSTISIA DIBRINA):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Sebentar, saya mohon izin kita tambahkan waktu sampai jam 5 pas ya. Jadi selesai nggak selesai harus kita ini kan, karena udah sore ini, makasih.

(RAPAT : SETUJU)

Ya silahkan Mbak, 5 menit aja Mbak.

PENGUSAHA CANGKANG SAWIT INDONESIA (YUSTISIA DIBRINA):

Ya oke.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat sore Pimpinan dan para Anggota Komisi VII.

Terima kasih atas undangannya.

Saya sedikit aja, saya juga tidak sebenarnya tidak mengerti masalah minyak goreng tapi dampaknya ke cangkang sawit itu juga ada. Jadi salah satunya produksi CPO, jika produksi CPO dilarang maka otomatis cangkang sawit itu tidak ada gitu. Jadi otomatis kita tidak bisa jualan, gitu kasarnya ya.

1 ton 1 ton CPO itu menghasilkan 250 kilo cangkang sawit. Jadi bisa di hitung bahwa kemarin gara-gara.

KETUA RAPAT:

Mohon maaf Mbak, Mbak siapa namanya Mbak.

PENGUSAHA CANGKANG SAWIT INDONESIA (YUSTISIA DIBRINA):

Oh maaf, nama saya Yustisia Dibrina bersama rekan saya Bapak Fajar. Saya di bidang kemitraan juga dan kelembagaan mewakili, Ketua.

KETUA RAPAT:

Oh ya.

PENGUSAHA CANGKANG SAWIT INDONESIA (YUSTISIA DIBRINA):

Oke, tadi sampai mana lupa lagi tadi.

KETUA RAPAT:

Tenang Mbak tarik nafas dulu dikit Mbak.

PENGUSAHA CANGKANG SAWIT INDONESIA (YUSTISIA DIBRINA):

Karena dikasih waktunya cuman 5 menit padahal catatannya banyak banget ini.

Oh iya oke, 1 ton menghasilkan 1 ton CPO menghasilkan 250 kilo cangkang sawit. Jadi 1 ton cangkang sawit itu adalah 4 ton CPO. Untuk masalah kebijakan DMO apa segala macam, apalagi penutupan kemarin juga

sangat berdampak Pak, karena karena kalau di tutup semuanya berarti kan tidak ada produksi di pabrik dan kita kita padahal kan padahal pengambilan cangkang sawit dari pabrik-pabrik gitu ya, dan lebih penting lagi bisnis cangkang ini memberikan kontribusi dan peningkatan perekonomian masyarakat di daerah-daerah tertinggal karena di sanalah letak perjuangan kita ceritanya ya, PDI lagi nih ya.

Terus bio massa sedikit lagi, bio massa dari cangkang sawit juga merupakan komoditi yang memberikan kontribusi pada devisa negara 1,4 triliun Pak, per tahun dan menyumbangkan APBD APBN 360 miliar per tahunnya. Ya untuk pajaknya, kita ini jadi sedikit curhat juga nih. Sebenarnya cangkang sawit itu kan limbah ya Pak awalnya tuh limbah, tidak ada komoditi eh setelah ada komoditinya, setelah ada nilai jualnya akhirnya dikasih pajak yang dulunya cuma 7 dolar terus pelan-pelan naik jadi 15 saya lupa, terus naik lagi sampai 33 dolar.

Padahal Pak 32 per ton, 32 US dolar per ton padahal nilai jual kita tuh cuman 100 dulu 112, 112 dolar. Jadi bisa dibayangkan kita udah kayak *empot-empotan* banget bayar pajaknya padahal kita untungnya ya maaf maaf aja untungnya paling cuman ya begitu lah nggak sebanyak yang kita kasih ke pemerintah gitu ya, ini curhat lagi nih ceritanya.

Itu nanti bisa ya Pak saya minta tolong ya Pak.

KETUA RAPAT:

Ini tadi baru dapat pesan dari Pak Ketua, Mbak ini kayak modelnya ngelawak ini, cepat sekali ini.

PENGUSAHA CANGKANG SAWIT INDONESIA (YUSTISIA DIBRINA):

Jadi maksudnya sekalian Pak curhat curhat sedikit nih ceritanya nih. Jadi masalah-masalah pajak juga masalah pajak cangkang juga agak agak berpengaruh di kita juga karena kita kan kontraknya itu sampai 15 tahun, Pak. Jadi kalau misalnya pemerintah juga kebijakan yang kadang tidak menentu tiba-tiba berubah gitu ya kasian kan kita gitu ya. Padahal kita kontraknya 25 tahun, 15 tahun, nggak bisa kita tiba-tiba bilang eh harga kita sekarang gini terus tiba-tiba kita minta naik lagi kan tidak mau *buyer*-nya gitu Pak.

Jadi masalah masalah kalau di cangkang sawit ini masalah pajaknya gitu dan distribusi masalah apa ketersediaan buahnya juga yang tadi saya bilang pengaruh DMO apa segala macam. Untuk masalah DMO, saya tidak saya tidak begitu mengerti apakah perlu di tambahkan berapa persen tapi mendengar cerita dari teman-teman sebenarnya kalau perbandingan kebutuhan dalam negeri dengan jumlah, ini bocoran dari teman-teman karena perbandingan kebutuhan dalam negeri dengan jumlah produksi CPO 1 per 10. Kebutuhan dalam negeri hanya 5 juta ton minyak goreng, sedangkan produksi CPO 45 juta ton per tahun. Jadi sebenarnya DMO tuh tidak perlu Pak menurut saya gitu.

Jadi DMO sebenarnya tidak diperlukan untuk teman-teman juga, setuju nggak Pak, teman-teman setuju nggak.

KETUA RAPAT:

Wah ini kalau sampai di kutip media habis Mbak ini Mbak.

PENGUSAHA CANGKANG SAWIT INDONESIA (YUSTISIA DIBRINA):

Karena kan karena curhatnya teman-teman seperti itu Pak gitu, jadi saya nggak tahu nanti kebijakan pemerintah bagaimana.

ANGGOTA KOMISI VII:

Mbak Mbak gini, teman-teman yang mana Mbak.

PENGUSAHA CANGKANG SAWIT INDONESIA (YUSTISIA DIBRINA):

Oh ya kan kita banyak asosiasi Pak jadi banyak dengar-dengar kuping juga Pak, dapat curhat-curhatan juga dari teman-teman gitu ya.

ANGGOTA KOMISI VII:

Ini agak ngelawan barang ini Pak.

PENGUSAHA CANGKANG SAWIT INDONESIA (YUSTISIA DIBRINA):

Jadi sebenarnya menurut saya sih DMO tidak diperlukan, kalau kalau tadi Bapak berbicara masalah DMO ya, saya nggak tahu mudah-mudahan ini bukan kapasitas saya ngomong tapi dengar dari teman gitu.

Jadi kembali lagi ke cangkang tadi. Mungkin kalau mau dibilang saya tidak tahu rapat ini apakah untuk menentukan hasil DMO kah atau tata kelola apanya yang mau di yang mau di simpulkan dari rapat kita ini gitu, karena kalau mau lihat dari masalah DMO atau penutupan keran ekspor itu kan harusnya kita juga lihat permasalahan di sawitnya juga banyak juga, Pak. Lebih bagus mungkin kita perbaiki permasalahan karena permasalahan di sawit juga banyak Pak ya yang seperti tadi Bapak bilang. Saya baru saja dapat berita bahwa lahan sawit itu bisa juga kadang melebihi batas IUP nya dia gitu. Jadi banyak sekali Pak dari masalah perizinan, terus apa legalitas lahannya, izin pabriknya, izin produksinya. Jadi kalau mau diperbaiki juga mungkin *problemnya* yang seperti itu yang harus kita sikapi gitu ya.

Mungkin itu saja Pak, kalau ada tambahan dari teman.

KETUA KOMISI VII DPR RI (SUGENG SUPARWOTO/F-P. NASDEM):

Pimpinan izin Pimpinan untuk langsung bisa di tangapin aja Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya sebentar, ini jarang-jarang Mbak ini, tadi makanya karena Mbak ini orangnya kalau terlihat nih karakternya agak ngelawan.

PENGUSAHA CANGKANG SAWIT INDONESIA (YUSTISIA DIBRINA):

Iya.

KETUA RAPAT:

Jadi sampai Ketua Komisi saya mau ikut merespon.

PENGUSAHA CANGKANG SAWIT INDONESIA (YUSTISIA DIBRINA):

Oke oke terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silahkan Pak Ketua.

KETUA KOMISI VII DPR RI (SUGENG SUPARWOTO/F-P. NASDEM):

Terima kasih.

Pimpinan Pak Maman Abdurrahman yang saya hormati, dan juga Anggota Komisi VII yang hadir fisik maupun *virtual*, dan ini ada Pak Dirjen Agro dan juga kawan-kawan dari asosiasi ya.

Sekali lagi, dengan penuh hormat kami mengucapkan terima kasih.

Mungkin sedikit nih bukan klarifikasi atau penjelasan. Bahwa prinsipnya begini, bahwa CPO yang produk turunan salah satunya adalah minyak goreng itu adalah dalam perkembangannya kemudian menjadi industri strategis karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Komponen dalam kebutuhan pokok sudah masuk namanya minyak goreng, inflasi itu adalah salah satu penyumbang nya adalah minyak goreng, bisa di cek itu.

Jadi begini, kenapa perlu DMO kan pertanyaannya kemudian. Jadi DMO itu adalah *Domestic Market Obligation*, DMO berapa persen itu adalah produk industri apa produksinya berapa. Misalnya kita dengar nanti coba di luruskan Pak Dirjen. Produksi CPO secara total kurang lebih setahun 57 juta ton, apa benar, lantas misalnya ketetapan DMO berapa. Misalnya 20%, artinya apa, seperlima dari produksi CPO itu adalah untuk kepentingan dalam negeri dengan harga sekaligus dipatok namanya DPO(*Domestic Price Obligation*), kenapa, ini untuk menghindari ketersediaan fluktuasi ketersediaan dalam negeri.

Kita sama-sama tahu namanya volatilitas nya kan sangat tinggi sekali menyangkut tentang komoditas. Hari ini misalnya CPO harga tiba-tiba

melompat tinggi kalau tidak di *pack* dengan kebutuhan dalam negeri pasti semuanya diekspor, kan begitu. Nah nih sekali lagi, campur tangan negara dibenarkan dalam mengatur, kenapa, karena sudah menyangkut hajat hidup orang banyak.

Ini juga sama di sama juga di listrik Bapak/Ibu sekalian, kalau tidak ada DMO dan DPO, hari ini listrik naik 3 kali lipat. Kenapa, karena batubara *gar* yang dikonsumsi oleh PLN *gar* 4.200 sampai 4.600 itu sekarang harganya 150 dolar per ton. Sama CPO ini, hari ini melompat tinggi sekali kan per ton nya. Kalau tidak di DMO (*Domestic Market Obligation*) sejumlah *volume* untuk kepentingan dalam negeri bahkan di kunci untuk kepentingan tuk harga dalam negeri ya semuanya lantas melompat tinggi.

Ingat, ya memang sistem kita ekonomi kita bukan ekonomi liberal terbuka, kita tidak boleh semata-mata diserahkan mekanisme pasar terbuka pasar bebas, kenapa, ya karena masyarakat kita disparitas kemampuannya masih senjang masih perlu kehadiran negara dalam hal ya ada namanya subsidi di BBM, di gas, itulah perlunya kita sama-sama menikmati apa apa yang di sebut *windfall profit*, kan begitu. Industri Agro sekarang menikmati industri apa *windfall profit* tetapi *windfall profit* itu jangan hanya dinikmati oleh pengusaha saja, masyarakat juga harus diperhatikan, itulah namanya DMO (*Domestic Market Obligation*) itu penting. Kenapa, karena minyak goreng atau CPO sudah dalam kategori menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sekali lagi ini karena sudah menyangkut kategori bahan pokok, kita dengar kebutuhan untuk C apa untuk minyak goreng itu CPO-nya hanya perlu 8 juta ton saja. Kalau industrinya 57 juta ton kan 20% juga cukup itu kurang lebih, nah itulah yang di maksud.

DMO tanpa mempengaruhi produktifitas cangkang Mbak karena tidak menyetop produksi DMO itu adalah CPO nya saja yang tidak semua di ekspor gitu loh, sekali lagi tidak seluruh CPO di ekspor. Ada namanya untuk kepentingan domestik sejumlah berapa, inilah diminta keikhlasan semuanya demi namanya juga ekonomi kita yang, nggak mungkin kalau semua di lepas di pasar dengan pasar bebas begitu saja karena juga kita ekonomi kita bukan ekonomi pasar bebas murni, ada campur tangan negara, begitu sekedar penjelasan.

Kok katanya apa agak melawan tadi sedikit. Memang saya kok bisik-bisik kok tampaknya dia agak ngelawan tipe orangnya, ternyata benar kan gitu. Saya kira tambahan Bapak Ibu sekalian ya, sekali lagi terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya ya makasih banyak Pimpinan.

Selanjutnya ini dari Bangka Belitung, *monggo*.

F-P.GOLKAR (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):

Baik Pimpinan terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat sore salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi VII, kemudian Bapak Ibu sekalian, Pak Dirjen beserta para asosiasi dari hulu sampai hilir ini, ya hulunya Pertanian Petani kemudian juga produsen yang menyebabkan ini hadir memenuhi undangan kami.

Jadi memang saya salah satu orang yang mengusulkan adanya rapat ini. Sebelum tanggal 23 Mei, isu kita adalah keresahan masyarakat ada sekitar 16 17 juta petani yang tergantung hidupnya kepada sektor sawit ini. Tetapi kemudian tanggal 23 Mei itu moratorium ekspor dicabut, sehingga kemudian saya pikir konteks kita hadir pada sore hari ini adalah berubah lagi, adalah bagaimana kita ingin melakukan akselerasi, akselerasi proses bisnis *supply chain* dari sektor sawit ini. Sehingga kemudian kembali normal, sehingga kemudian semua pihak yang tadinya sudah *happy*, sudah gembira, sejahtera, ini kembali posisinya.

Namun sayang, saya mendapat dan membaca paparan ya dari Pak Dirjen, dari sini kurang lebih secara *frame*-nya kita dapat bayanganlah ya bagaimana neraca CPO, minyak goreng sawit, dan sebagainya. Jadi contoh misalkan dari neraca dari struktur pohon yang di sampaikan ini misalkan untuk CPO, CPO ekspornya kira-kira 5% dari produksi ya toh. Nah, kemudian turunan daripada CPO ini untuk bio diesel, oleinkimia, kemudian *refine palm oil*. Dari *refine palm oil* ini kita melihat ekspor RPO-nya 23% kalau dari data ini, kemudian dari RPO ini yang untuk di dalam negeri nya kemudian diturunkan kembali ada namanya RBD *palm oil*. Nah tadi saya belum hafal-hafal juga kepanjangannya seperti itu, dan kalau dari data ini ada 63% yang di ekspor.

Jadi memang kalau kita lihat dari apa perkembangannya, makin ke hilir ini makin tinggi muatan untuk ekspor nya, seperti itu. Sehingga memang kita bisa simpulkan bahwa ketika ada larangan untuk ekspor, ini memang mempengaruhi. Tadi saya berpikir saya melihat di awal loh ini kok cuman 5% ekspor CPO, ternyata produk turunanannya banyak sekali.

Saya pikir yang lebih relevan adalah pada sore hari ini. Saya ingin mendengar keluhan kesah dari pada para apa namanya mata rantai yang tadi di sebut ekosistem oleh Bapak yang dari asosiasi petani tadi. Ini masing-masing keluhannya apa, saya baru mendengar dari yang minyak jelantah ini ya toh, sama cangkang mungkin seperti itu.

Nah Pak, bagaimana untuk mengakselerasikan ekspor Bapak atau penjualan Bapak dari para asosiasi, ini kami perlu dengar. Tanggal 18 Mei 2022 kemarin, saya ini kan asalnya dari Dapil Bangka Belitung, repot kita Pak. Di Beltim misalnya itu demo masyarakat besar-besaran, penyampaian aspirasi

kepada Bapak Bupati, kemudian Bapak Bupati segera menyampaikan hasil daripada apa keluhan masyarakat itu ke pusat disampaikan langsung ke Setneg. Nah, kemudian juga langsung menyampaikan aspirasinya kepada saya selaku apa namanya dapil daripada Bangka Belitung. Nah ini kan memang menjadi satu isu Pak bukan hanya soal di Bangka Belitung saja tetapi di tempat lain juga begitu.

Nah oleh karena itu, tentu persoalan-persoalan ketika ingin memulai ini persoalan logistik ya toh, contoh kayak Belitung, kita langsung tanya kemarin salah satu produsen karena di situ ada 1 yang memproduksi minyak goreng minyak goreng ya. Ini gimana anunya untuk menggerakkan kembali karena semua berkeluh kesah tangki sudah penuh, kan begitu Pak keluhan daripada semua pabrik kelapa sawit dan sebagainya itu tangki sudah penuh. Bagaimana untuk menjalankan itu, kami perlu tahu Pak dan kemudian berapa lama prosesnya Bapak kembali menjadi normal Pak, saya bertanya lagi tadi kepada salah satu yang punya pabrik kelapa sawit di Pulau Bangka.

Misalkan ku bilang, Pak ini bagaimana, kapan bisa kembali pembelian normal dan sebagainya. Pak kami ini bukan persoalan logistik saja tetapi di ujung penjualan misalkan apa itu namanya Pak Hendrik yang di Belawan dan di Dumai itu tempat penjualannya dia, itu tidak ada transaksi Pak kemarin tanggal 23, harga tidak cocok semua. Nah, kami perlu penjelasan, ini gimana untuk mendorong itu. Sehingga walaupun Bapak bilang harga di luar mahal ya toh, apakah gara-gara 1 bulan ini kita ndak boleh ekspor, lalu kemudian ekspor kontrak-kontrak Bapak itu kemudian di ambil alih pihak lain, misalkan dari Malaysia dan sebagainya.

Ini kan jadi satu isu yang kita harus perhatikan, nah tapi juga jangan berkelit kepada sesuatu yang mungkin ada *case* kecil tapi jadikan alasan besar-besar gitu. Nah, kami perlu penjelasan Pak karena yang paling penting ketika Bapak bisa produksi, Bapak bisa menjual, semua *happy* Pak, Bapak *happy*, kami dari selaku bidang pengawasan perindustrian juga *happy* dengan situasi ini. Kami kepada konstituen kami di masyarakat para petani juga bisa menjelaskan bahwa ini akan segera, nah ini Pak, satu.

Kemudian kepada Pak Dirjen, mungkin ini saya tidak perlu jawab di forum ini. Bapak tahu nggak tanggal 20 Mei kemarin itu Menko Marinves ada mengumpulkan 72 produsen minyak goreng sawit dalam 1 *zoom meeting*, kemudian mendorong agar mereka segera melakukan *packing*. Ini kalau saya lihat pada skema Permenperin Nomor 8 Tahun 2022 ini kan perlu kita kita evaluasi kembali karena ada kata-kata dilarang untuk di *packing* dan sebagainya.

Itu 3 bulan kemudian akan di evaluasi bahwa mereka harus segera melakukan *packing* padahal ini kan lapangannya besar Pak, kan yang namanya produsen minyak goreng ini kan berkaitan dengan apa CHSE ya toh, berkaitan dengan gedung, mesin dan sebagainya. Maksud kami kebijakan-kebijakan yang ada berkaitan dengan minyak goreng ini harus sinkron semua, jangan kemudian ada yang jalan-jalan sendiri, nah ya seperti itu Pak.

Kemudian tadi saya setuju Pak yang Bapak dari minyak jelantah itu Pak. Agak aneh juga misalkan tadi Bapak menceritakan produk Bapak itu no ekspor tapi Bapak di kenakan DMO, padahal di dalam negeri sendiri Bapak mengatakan tidak ada industri yang menyerap. Nah ini agak sedikit aneh juga, kita mungkin *case by case* kita perlu liat. Sehingga semuanya bisa berkontribusi dan apa namanya negara mendapatkan manfaat.

Kemudian ya saya pikir demikian ya. Sayang sekali Pak Tifatul nggak ada, kalau nggak ada pantun ini buat beliau biasanya sambut menyambut.

*Di sela daun si burung perit,
Didalam semak mencari makan,
Jangan abaikan industri sawit,
Agar sejahtera masyarakat untuk penghidupan.*

Demikian yang bisa saya sampaikan, atas waktu dan kesempatan saya ucapkan terima kasih.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Jangan lupa yang beroperasi yang di Bangka Belitung nanti dukung beliau lagi loh.

Oke, silahkan Pak ini ini orang Medan juga Pak.

F-P. DEMOKRAT (Drs. HENDRIK HALOMOAN SITOMPUL, M.M.):

Terima kasih Pimpinan Pak Maman.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi VII, beserta Rekan-rekan Komisi VII, dan juga Yang kami hormati Pak Dirjen, beserta Rekan-rekan asosiasi yang sudah hadir disini sebagai mitra Komisi VII.

Pertama saya terima kasih atas paparan Pak Dirjen tapi yang pasti saya tidak puas apa yang disampaikan paparan Pak Dirjen karena pertanyaan saya tidak terjawab di paparan Pak Dirjen.

Berikutnya terkait dengan CPO ini, kebetulan saya Pak Dirjen ini saya asli Medan, jadi dapil saya Medan Deli Serdang, Serdang Tebing. Jadi sawit sangat tumbuh disana ya, jadi saya tahu betul situasi dan juga saya Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia Sumatera Utara.

Tagline nya adalah *tagline* nya pembicaraan pernyataan saya ini adalah ini semua akibat *kartel* ya, boleh kita cek satu-satu Pimpinan. Dari hulu sampai hilir sampai ekspor itu perusahaannya itu itu juga. Ya di asosiasi ini perusahaannya itu juga, asosiasi produk ini di perusahaan itu juga, di produk ini juga perusahaan itu juga. Jadi dari hulu sampai hilir semua perusahaan

hampir yang sama, termasuk juga pemasarannya, distribusinya. Itu yang harus kita ungkap sebenarnya.

Pak Dirjen, teman-teman tidak usah menjawab saat ini tapi boleh lah nanti di jawab dengan tulisan-tulisan ya. Tapi kesimpulan saya adalah ini akibat *kartel*, karena apa, dari hulu sampai hilir perusahaannya itu aja. Kita ibaratkan saya katakan burana, burana itu apa namanya gambar itu gunung katanya ya, seperti itu lah kira-kira gunung, gunung begitu lah kira-kira formatnya Pak Pimpinan. Di bawah itu semua dari hulu semua masuk petani semua sampai di atas itu hanya beberapa para naga-naga naga-naga kelapa sawit yang ada, betul Pak, ya. Nah Bapak ini sudah bilang, jadi sebenarnya yang di atas itu hanya berapa aja.

KETUA RAPAT:

Jadi gini kali Pak,

Disana gunung disini gunung,
Itulah gunung-gunung.

F-P. DEMOKRAT (Drs. HENDRIK HALOMOAN SITOMPUL, M.M.):

Iya iya, jadi seperti itu kira-kira ilustrasinya Pak, gunung itu. Jadi terkait CPO ini seperti itu hulu dan hilirnya Pak. Jadi yang harus kita cari Pak, pertama, berapa banyak perusahaan pemilik PKS pertama yang PMA asing. Kedua, yang dalam negeri dan BUMN, ini punya PKS masing-masing ini Pak ya. Di catat berikutnya Pak, berapa banyak perusahaan yang melakukan ekspor, PMA, BUMN, dalam negeri, termasuk itu perusahaan BUMN yang pusat perdagangan itu apa namanya Pak yang di Cut Meutia, nah itu kita lihat di sana berapa. Terus berapa banyak perusahaan PKS yang menghasilkan CPO menghasilkan CPO, PMA, dalam negeri, dan BUMN.

Berikutnya, berapa berapa banyak perusahaan dari CPO dan turunannya baik itu PMA, dalam negeri, dan BUMN. Berikutnya, Pak berapa pelabuhan curah ekspor yang ada di Indonesia ini nah ya, berikutnya berapa banyak perusahaan yang betul-betul melakukan ekspor yang daerah tujuannya itu adalah grup dari perusahaan eksportir itu. Jadi sebetulnya importir nya itu Pak adalah grup dari eksportir itu, dan mereka punya pabrik di daerah importirnya sana negara ke sana.

Ini harus di selusuri dan saya lihat pemerintah tidak sampai ke sana Pak, hanya melihat domestiknya saja. Padahal CPO ekspor itu adalah yang membeli itu importirnya adalah perusahaan grup yang ada di Indonesia ini juga, itu lah yang sebenarnya terjadi tapi tidak pernah di ungkapkan hal-hal seperti ini. Yang melihatnya hanya ya kelapa sawit dimana mana, ndak, kita lihat ini cobalah di di inventarisir siapa sebenarnya pemilik perusahaan ini, saya yakin tidak akan lebih dari 15 perusahaan.

Berikutnya, Pak Dirjen tahu nggak bahwa CPO itu CPO itu ada impor juga, setelah mereka impor mereka langsung ekspor. Nah, itu ada di Medan Pak di

kawasan industri, dia impor CPO, langsung dia ekspor. Ada apa *di sini*, maka tadi saya bilang paparan Pak Dirjen itu, saya kira ndak puas saya karena apa yang saya tanya ini nggak terjawab semua di sini ya.

Saya berharap perusahaan-perusahaan ini harus betul-betul di inventarisir Pak. Teman-teman asosiasi harus terbuka juga bahwa di semua lini asosiasi itu ada mereka disana, baik dari hulu sampai di hilir. Nah, setelah itu mari kita menanyakan NKRI mereka, kita tanyakan merah putih mereka sampai jauh mereka sampai suasana begini ya caruk maruk soal minyak goreng ini. Nah, itu saya kira yang jadi *pointer-pointer* bagi kita dan mohon nanti data-data itu Pak Dirjen sampaikan agar bisa kita analisis lagi, agar kita *caus* sebetulnya siapa sebetulnya pemilik CPO dan turunannya ini sebenarnya di Indonesia ini.

Demikian, terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih banyak atas pertanyaannya Pak. Saya pikir nanti yang pertanyaan-pertanyaan tadi ada, dari Bapak, dari Pak Bambang juga nanti bisa kita jawab, nanti di jawab secara tertulis aja data-data nanti di ini.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Satu lagi Pak.

KETUA RAPAT:

Ya sebentar Pak, jarang-jarang Pak ada yang kita undang kayak gini yang ngacungin tangan minta ngasih ini Pak, kebanyakan nggak ada yang mau ngomong Pak. Jadi apresiasi saya juga nih buat Bapak-bapak semua nih mau kali ngomong, mungkin karena bahagia di Pimpin oleh saya kali dan hari ini saya lagi hari baik bulan baik Pak, biasanya saya agak keras tapi karena ketemu Bapak-Bapak ini apalagi yang tadi agak ngelawan itu jadi, jadi saya murah senyum.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Pimpinan satu.

KETUA RAPAT:

Ya silahkan Bang Nasril.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Ya makasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Gini, Bang Nasril boleh nggak saya tuntaskan dulu 2 terakhir ini.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Ya.

KETUA RAPAT:

Boleh boleh ya.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Boleh, boleh.

KETUA RAPAT:

Boleh Bang ya, jadi abis tuntaskan dulu, ini kan masih ada yang pengemas nih, ini ada lagi nih satu nih Pak tukang kemas kemas minyak goreng ada dia. Oh ya Bapak yang tukang kemas kan, betul kan, oh tenang aja Pak nanti kita kasih kesempatan untuk Bapak.

Ya boleh Bang ya Bang Nasril ya boleh ya saya tuntasin dulu ya.

Nah silahkan Bapak tukang kemas.

ASOSIASI APPMGI (ASOSIASI PENGUSAHA PENGEMAS MINYAK GORENG INDONESIA):

Ya.

KETUA RAPAT:

Jangan terlalu lama Pak, 3 menit aja lah soalnya waktu nih.

ASOSIASI APPMGI (ASOSIASI PENGUSAHA PENGEMAS MINYAK GORENG INDONESIA):

Baik Pak.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat Bapak Pimpinan Komisi VII,
Yang terhormat Ketua anggota dewan dari Komisi VII, dan
Rekan-rekan semua dari asosiasi yang saya hormati.

Kami dari APPMG, kita Asosiasi Pengusaha Pengemas Minyak Goreng. Kami berdiri tahun kurang lebih tahun 2016 Pak, saat ini anggota kami ada 45 anggota. Kami omset untuk per bulan selama ini kami kemas kurang lebih bisa 32 juta liter, Pak. Jadi asosiasi kami ini.

KETUA RAPAT:

Berapa lama Pak, setahun.

ASOSIASI APPMGI (ASOSIASI PENGUSAHA PENGEMAS MINYAK GORENG INDONESIA):

1 bulan Pak, dalam 1 bulan kami bisa mengemas minyak goreng itu kurang lebih 32 juta liter, adapun.

KETUA RAPAT:

Bapak, Bapak ini bukan termasuk yang pelaku-pelaku kemas minyak goreng curah di bikin kemasan yang itu bukan ya Pak.

ASOSIASI APPMGI (ASOSIASI PENGUSAHA PENGEMAS MINYAK GORENG INDONESIA):

Bukan, justru kali ini kami ingin berkeluh kesah tentang itu Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silahkan Pak.

ASOSIASI APPMGI (ASOSIASI PENGUSAHA PENGEMAS MINYAK GORENG INDONESIA):

Ya, jadi begini Pak, ini kaitan dengan aturan pemerintah yang di terapkan saat ini. Kami ini adalah *packer* yang memang saat sangat taat dengan aturan pemerintah ya Pak ya. Jadi kami ini bukan hanya sekedar mengemas minyak goreng, tetapi kami juga sudah memiliki BPOM, kami memiliki SNI sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Perindustrian begitu Pak. Tetapi saat ini kami seakan-akan sudah sangat di gencet begitu ya karena minyak goreng yang harus dikemas itu harganya harus yang harga komersil begitu Pak, sudah harga tinggi.

Tetapi di sisi lain minyak goreng yang subsidi ini sangat digelontor sama pemerintah, sehingga kami sangat kesulitan untuk menjual produk kami. Kalau misalkan tadi yang disampaikan sama Pak Dirjen kenapa harga 15.500 tidak kesampaian, saya melihat di pasar itu banyak pedagang-pedagang yang menjual minyak goreng dalam bentuk botol bekas begitu loh Pak, itu pun harganya sudah di atas 15.500 sesuai dengan di atas HET itu.

Jadi dalam hal ini kami sangat sangat tidak bisa menjual produk kami begitu, Pak. Kalau hal ini bisa terus di biarkan, tidak menutup kemungkinan usaha-usaha kami juga akan mengalami gulung tikar juga, karena mengingat kalau misalkan *repacker* ini tidak hanya kami yang memang terdampak tentunya ada perusahaan-perusahaan penyedia *raw material* seperti botol, kardus, dan sebagainya juga akan ke dampak dalam hal ini Pak. Karena kurang

lebih saya bisa mendata itu bisa menyerap tenaga kerja sampai 10.000 orang gitu dari semua anggota kami, itu satu Pak.

Jadi yang kedua, kami berharap ke depan ini kalau bisa minyak goreng ini sudah tidak ada lagilah minyak goreng curah, minyak goreng curah dibatesin saja gitu maksud saya. Jadi hanya masuk di industri-industri saja begitu Pak. Kenapa saya katakan demikian ya, karena kita tahu aja Pak kalau ada orang atau kita waktu *supply* pasar tradisional atau tangki yang datang untuk *supply* minyak goreng curah tersebut ada Ibu-ibu itu saya lihat ada membawa jerigen bekas gitu kan, bekas cat juga kita kan nggak tahu, bekas jelantah juga nggak tahu gitu kan. Di sisi lain itu juga akan dimakan manusia gitu loh Pak, dan di sisi kesehatan saya kalau menurut saya ini sangat perlu kita pertimbangkan karena sesuai yang di asuh atau yang di.

KETUA RAPAT:

Bapak sebentar Pak, apa hubungannya.

ASOSIASI APPMGI (ASOSIASI PENGUSAHA PENGEMAS MINYAK GORENG INDONESIA):

Ya Pak.

KETUA RAPAT:

Minyak goreng curah dengan sepiunya urusan Bapak *repacking packing* ini, hubungannya *di mana* Pak. Ini kan minyak goreng curah, pemerintah dorong kebijakan itu terus Bapak kan aktifitasnya kan adalah *mem-packing*.

ASOSIASI APPMGI (ASOSIASI PENGUSAHA PENGEMAS MINYAK GORENG INDONESIA):

Betul.

KETUA RAPAT:

Mempackaging, membuat kemasan, tahap-tahap apalah macam-macam itu. Hubungannya dimana, gara-gara ada urusan minyak curah ini lalu Bapak omset nya ini berkurang.

ASOSIASI APPMGI (ASOSIASI PENGUSAHA PENGEMAS MINYAK GORENG INDONESIA):

Karena kami tidak diizinkan membeli minyak goreng curah subsidi tersebut Pak.

KETUA RAPAT:

Bukan, Bapak kan cuman *packing packing* aja Pak, kenapa Bapak harus beli minyak goreng itu.

ASOSIASI APPMGI (ASOSIASI PENGUSAHA PENGEMAS MINYAK GORENG INDONESIA):

Ya justru saya *packing* ini saya jual saya beli dari minyak goreng yang sudah harga mahal.

KETUA RAPAT:

Oh, jadi Bapak ini bukan cuman *packing* aja kerjaan Bapak, betul dong.

ASOSIASI APPMGI (ASOSIASI PENGUSAHA PENGEMAS MINYAK GORENG INDONESIA):

Iya.

KETUA RAPAT:

Berarti Bapak ini beli minyak goreng, Bapak *packing*, betul dong.

ASOSIASI APPMGI (ASOSIASI PENGUSAHA PENGEMAS MINYAK GORENG INDONESIA):

Iya betul Pak.

KETUA RAPAT:

Oh, tadi yang dalam benak saya apa hubungannya Bapak yang *packing* kalau Bapak sibuk-sibuk mengurusin minyak curah.

ASOSIASI APPMGI (ASOSIASI PENGUSAHA PENGEMAS MINYAK GORENG INDONESIA):

Bukan, jadi itu yang jadi *problem* kami Pak, begitu Pak.

ANGGOTA KOMISI VII:

Low *branded* dia nih, jual *branded*.

ASOSIASI APPMGI (ASOSIASI PENGUSAHA PENGEMAS MINYAK GORENG INDONESIA):

Jadi, iya kami jual *branded* Pak. Jadi kami sesuai saham kami dengan pabrik.

KETUA RAPAT:

Bapak ini kalau baju ini Louis Vuitton Pak.

ASOSIASI APPMGI (ASOSIASI PENGUSAHA PENGEMAS MINYAK GORENG INDONESIA):

Iya, jadi seperti itu Pak. Jadi saya sangat berharap kalau bisa di Indonesia ini minyak goreng wajibnya semuanya dalam bentuk kemasan saja itu semuanya begitu Pak, karena dari sisi kesehatan juga pasti terjamin karena kami sudah ber-SNI, kami sudah ber-BPOM, dan mudah untuk pengawasannya gitu. Kan kita tahu di seluruh dunia baru Bangladesh sama Indonesia yang memang minyak goreng curah ini ada gitu kan, kenapa ini tidak harus kitaantisipasi lebih dini maksud saya Pak Pimpinan, jadi.

KETUA RAPAT:

Ada lagi Pak.

ASOSIASI APPMGI (ASOSIASI PENGUSAHA PENGEMAS MINYAK GORENG INDONESIA):

Baik Pak, itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang baik ini.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Secara prinsip Pak aspirasi Bapak biar kita tampung Pak. Cuman Bapak beruntung saya hari ini lagi baik sekali Pak, soalnya tadi ada bahasa Bapak yang agak sedikit berbahaya itu Pak, karena urusan Bapak meniadakan minyak goreng curah itu bisa ramai satu Republik Indonesia ini Pak. Cuman karena hari ini saya lagi baik, waduh saya lagi lagi hari baik bulan baik Bapak.

Oke Pak. Terakhir ya, abis ini silahkan nanti ke Mbak Juwi dan Bang Nasril.

Selanjutnya ini ada kelompok pengusaha yang anti sama asosiasi, nah silahkan Pak. Jadi ini pengusaha kelapa sawit non-asosiasi, bisa dibilang ini berarti kelompok pengusaha yang nggak suka sama asosiasi, dia ndak mau gabung sama Asosiasi, begitu lah kurang lebih.

Silahkan Pak.

PENGUSAHA NON ASOSIASI (HASYIM):

Baik terima kasih Pak.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat sore.*

Yang saya hormati Bapak Pimpinan sidang, dan
Yang saya hormati Bapak Pimpinan Komisi VII, dan
Seluruh anggota Komisi VII yang saya hormati, dan juga
Yang saya hormati Bapak Dirjen Pak Putu dan beserta jajarannya,
Serta teman-teman semuanya anggota Asosiasi dan Non Asosiasi.

KETUA RAPAT:

Pak buka dikit Pak maskernya, waduh waduh.

PENGUSAHA NON ASOSIASI (HASYIM):

Baik, nama saya Hasyim Pak.

KETUA RAPAT:

Waduh Pak Hasyim.

PENGUSAHA NON ASOSIASI (HASYIM):

Pak Maman saya kira tidak mengenalin saya.

KETUA RAPAT:

Waduh mohon maaf Pak.

PENGUSAHA NON ASOSIASI (HASYIM):

Saya kenal Pak Maman sudah cukup lama ya.

Baik, begini Pak, tidak banyak yang ingin saya sampaikan karena tadi sudah disampaikan oleh dari GIMNI juga. Namun saya *appreciate* yang akan saya sampaikan oleh Bapak Ketua Komisi tadi mengenai DMO. Ini memang hal yang paling utama Pak karena kita lupa bahwa komoditas minyak goreng kita itu adalah *next exporter* Pak, dengan *next exporter* itu artinya kita ekspor barang komoditas kita dan kita tidak pernah apa terhindar tidak harga komoditas di luar negeri. Tentunya kalau kita sebagai pedagang melihat harga di luar negeri tinggi, kita cenderung untuk ekspor.

Nah, namun seperti tadi dikatakan kita bukan negara liberal, oleh sebab itu kita harus melakukan apa itu apa yang terbaik buat kebutuhan dan kepentingan dalam negeri. Nah, saya bisa berhitung disini Pak, kalau kita itu di *tag* harga di katakanlah 14.000, maka CPO yang harus di jual di dalam negeri itu adalah 9.500 *rafla* kurang lebih. Nah, harusnya pemerintah itu mempunyai kebijakan 2 harga, 2 harga, harga khusus untuk dalam negeri yang di control oleh *government* untuk kebutuhan domestik tadi itu dan untuk yang ekspor silahkan mau harga sampai sejuta pun nggak ada masalah, seperti itu.

Nah, ini yang tampakna tuh tidak pernah di sentuh secara secara apa secara aturan. Kalau kita lebih fokus lagi Pak dari 8 juta tadi itu, itu hanya 2,7 juta ton CPO yang di gunakan untuk kebutuhan dalam negeri yang untuk masak memasak. Semestinya itu yang di kontrol 2,7 juta di kontrol dengan harga 9.500 dan di di apa di kontrol apa produsennya siapa saja yang memproduksi tadi seperti kemasan yang kayak oleh Bapak tadi itu. Jadi kondisi seperti itu itu *Insha Allah* kita tidak akan, Malaysia bisa melakukan hal seperti itu kenapa kita tidak bisa.

Contoh, bulan lalu saat Ramadhan saya umrah, saya lihat harga RON 91 di Arab Saudi 2,68 riyal, tapi di sisi yang sama saya ngecek harga RON 91 Aramco ekspor di harga 1,34 US dolar. Artinya kalau di rupiah kan RON 91 di dalam negerinya Arab Saudi itu harganya *start* 8.000 rupiah per liter sementara ekspor nya dia 19.000 rupiah per liter, artinya *clear* untuk dalam negeri dengan harga murah. Namun ini perlu dan perlu sekali kontrol dari *government* dan juga kontrol dari penegak hukum. Karena kalau tidak ya sama juga bohong, akan mengarami lautan, seperti itu Pak.

Saya kira itu itu itu yang paling DMO, DPO sudah sangat bagus Pak tinggal hanya saya hanya minta dari sisi *complicated*-nya pada saat kita membuat di apa yang di kerjakan oleh Pak Putu bukan karena saya menjilat beliau, beliau Dirjen yang sangat luar biasa Pak.

KETUA RAPAT:

Jangan di jilat Pak asin.

PENGUSAHA NON ASOSIASI (HASYIM):

Karena beliau salah satu Dirjen yang sangat mudah untuk di dengan WA beliau respon, tidak semua dirjen seperti itu.

KETUA RAPAT:

Saya WA beliau jarang di balas Pak.

PENGUSAHA NON ASOSIASI (HASYIM):

Ya seperti itu Pak, jadi saya *appreciated* sekali dari kebetulan saya dari PT INL, PT INL ini adalah anak usaha dari PT PN sama-sama plat merah jadi saya juga tidak mau terlalu banyak komentar karena kita sama-sama plat merahnya ini Pak, seperti itu. Jadi itu tadi Pak, jadi untuk harus berhati-hati dalam berbicara karena saya tidak boleh asal, *background* saya swasta Bapak tahu sendiri saya 13 tahun tinggal di Singapura saya tidak tidak berbisnis. Jadi saya hanya melihat seperti itu, kita tidak bisa lepas seperti negara liberal tidak bisa. Itu yang harus di kontrol Pak hanya cukup 2,7 juta *metrik* CPO yang khusus untuk kebutuhan domestik itu yang harus di kontrol, kalau itu bisa di lakukan akan bagus.

Satu hal lagi Pak tambahan lagi dengan minyak goreng curah. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak...(suara tidak jelas)...itu tanggal 20 lalu. Lambat laun minyak goreng curah itu memang seharusnya di di hindari Pak. Karena begini Pak, dari sisi *chemical* IV56 masih ada 20% *stearin* tidak baik buat kesehatan Pak. Jadi kenapa kok itu di ekspor, kalau kita di ekspor katakanlah kenapa sekarang Ukraine itu apa kita apa itu minyak goreng meningkat di sana. Faktornya begini Pak, IV56 itu itu kalau kita ekspor ke India mereka proses lagi menjadi IV60 dan mereka ambil *stearin* nya 20%, ada *added value* di situ. Mereka tidak memberikan apa itu minyak goreng IV56 ke rakyatnya karena masih ada *stearin* nya 20%. *Stearin* itu karbon Pak, ada C12 sampai C18 dan itu tidak sehat kalau itu kita konsumsi. Oleh sebab itu sebaiknya ada aturan bahwa minyak kemasan dalam negeri itu harusnya adalah IV58 dan IV60.

Dan juga tambahan sedikit Pak, kemarin juga saya dapat kita *supply* ke UMKM. Sebagian dari mereka *appreciated* dengan apa minyak goreng curah yang yang bagus, tapi karena sebelumnya mereka itu menggunakan minyak goreng curah IV12 dan IV14 dan sangat berbasa dan itu tidak bagus. Oleh sebab itu dalam hal ini mungkin info juga dengan Departemen Perindustrian kontrol minyak goreng yang sudah ada di masyarakat tuh betul-betul harus lebih apa lebih lebih tajam karena kalau tidak kasihan.

Minyak goreng ini adalah konsumsi tiap hari, kalau kita tidak kontrol dengan baik, artinya banyak orang kita yang sakit dan kalau kita yang sakit banyak BPJPK juga akan berat, apa itu BPJS juga akan berat. Oleh sebab itu, nantinya pemerintah sendiri yang akan berat. So, dengan minyak goreng yang bagus yang kita berikan ke masyarakat *Insha* Allah akan lebih bagus, seperti itu Pak.

Saya kira demikian, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ok, cukup Pak, ada tambahan lagi sedikit Pak, ada lagi sedikit.

PENGUSAHA NON ASOSIASI (HASYIM):

Sudah Pak.

KETUA RAPAT:

Oh udah cukup.

Apa, pertama begini, Pak.

PENGUSAHA NON ASOSIASI (HASYIM):

CP10 dan IV56 sama, Pak.

KETUA RAPAT:

Ya, ya, Pak, oke.

Jadi ada begini Pak, di mana-mana di saat ada disparitas harga yang berbeda di dalam satu produk, itu pasti potensi para pemain-pemain sabuk hitam tadi Pak, itu pasti tinggi, bermain mereka itu. Secara prinsip sebetulnya potensi pada saat di dorong DMO eh, pada saat kita dorong DMO tensi terjadi permainan itu pasti ada, gitu dulu tuh, karena kebetulan kita Komisi VII nih cukup khatam dan hapal kalau urusan DMO-DMO nih karena ini terjadi juga di batubara. Nah, makanya kalau kayak di batubara walaupun kita berlakukan DMO sama DPO terakhir kemarin kita mendorong agar tetap di buat sistem kayak BPDPKS atau BLU.

Jadi, ini kan yang jadi masalah gini Pak, *hitoh*-nya ini kan gampang aja tadi nih. Bapak nih bercerita semua disini, intinya semua Bapak-bapak memang betul-betul *nature* nya adalah pengusaha. Nggak ada pengusaha di republik dunia manapun yang pengen rugi Pak, intinya namanya pengusaha itu pengen untung. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita mencari titik temu antara para pengusaha yang pengen untung dengan kepentingan domestik ataupun kepentingan masyarakat.

Jadi Pak Dirjen, itu kalau misalnya diberlakukan DMO Pak Dirjen, berarti kan ada harga yang beda tuh Pak Dirjen, antara harga domestik DPO domestik dengan DPO ekspor. Pertanyaannya misalnya GAPKI ini kita kasih tugas dia untuk ke DMO, mau dia penuhi, Pak.

Pak GAPKI, misalnya Bapak dapat tugas, Pak. Bapak produksi 100.000 ton, nah 20.000 ton tuh Bapak ditugaskan untuk penuhi domestik. Kira-kira menurut Bapak gimana, Pak. Ya artinya kan berarti kan Bapak akan, betul. Bapak akan melakukan dengan berat hati, pasti begitu.

Nah, sebetulnya sistem subsidi gotong royong itu juga bisa menjadi solusi sebetulnya. Jadi itu juga yang memang nanti akan kita jadikan pembahasan. Poinnya begini yang kami mau bilang bahwa rapat hari ini tidak akan selesai hanya hari ini saja. Ini sebetulnya rapat *hearing* pertama, kita mengundang semua pihak nanti akan kita sisir satu persatu supaya teman-teman Komisi VII ini mendapat gambaran utuh dulu, Pak. Hari ini kan akhirnya kita baru tahu oh ternyata di *repacking* aja ada isu, di *kernel* di cangkang ada isu, oh ternyata di jelantah ada isu juga, oh ternyata Bapak-bapak di GAPKI juga ada isu, oh ternyata di kelompok petani juga ada isu. Minimal hari ini dalam rapat ini kami Komisi VII mendapatkan gambaran utuh dulu nih, oh ternyata dari helikopter *view*-nya kondisinya seperti ini. Jadi nanti pasca hari ini kita akan buat lagi agenda rapat *breakdown* turunan untuk masing-masing wilayah.

Jadi kita akan mulai dulu dari isu DMO, DPO-nya baru setelah itu kita undang Bapak, kita akan sisir satu persatu Pak, supaya kita akan memberikan masukan dan usulan kepada pemerintah, usulan yang memang betul-betul tepat. Jadi nggak lagi kita seperti gali lobang, tutup lobang menyelesaikan

masalah dengan masalah baru, gitu loh. Kurang lebih seperti itulah rapat hari ini.

Selanjutnya silahkan Bang Nasril, habis itu Mba yang paling Juwi.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Ya terima kasih.

Pimpinan anggota Komisi VII yang kami hormati,
Pak Dirjen.

Kita sudah rapat lebih pada dua setengah jam hampir 3 jam.

Saya singkat Pak, kembali kepada posisi halaman 23 lagi ya. Kalau kita usulkan DMO itu 30%, pendapat Bapak apa?

KETUA RAPAT:

Ini *sorry* Bang, 30% dari berapa Bang?

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Dari total produksi CPO.

KETUA RAPAT:

CPO.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Iya.

KETUA RAPAT:

Oke, berarti ini bukan produksi minyak gorengnya ya bukan tapi produksi CPO ya.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

CPO-nya, karena dari dari 30% itu kan sekitar 15 juta ya Pak, 15 juta CPO, 15 juta CPO kan.

KETUA RAPAT:

Nggak gini-gini Pak, yang jadi patokan itu angkanya 52 juta ini Pak ya, ya produksi CPO-nya pakai patokan yang 52 juta itu ya.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

52 Pak iya, karena begini, tadi ada *repacking* ya mengeluh ya kan kita tamping Pak, kan gitu. Biar semua jadi pengusaha *repacking* tetapi kalau *branded*-nya banyak di republik ini kan juga masih murah kan gitu. Tadi ada saran dari Pak ada Pak yang anti.

KETUA RAPAT:

Asosiasi.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Asosiasi ya, yang non-asosiasi beliau mengatakan ya harus *repacking*, oke berarti mendukung yang *repacking*. Nah, artinya *repacking* jalan ya, namun tidak mendominasi pabrikan-pabrikan besar ya. Banyak *branded-branded* baru yang keluar ya. Nah, sehingga minyak goreng di temui oleh masyarakat di bawah itu ya paling tidak bisa mendekati HET tadi. Nah berapa, kalau kami usulkan 30 lebih kurang, menurut Bapak kebesaran atau ketinggian, ya Pak.

KETUA RAPAT:

Ya, Pak, silahkan, silahkan Pak, silahkan Pak Dirjen jawab ini.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Terima kasih.

Jadi kalau kita lihat Pak, mungkin lihat dari ekspornya. Jadi jangan lihat dari CPO nya karena kalau CPO ini tinggal 5% atau 9,2% yang kita ekspor di 2021. Ekpornya itu 2,7 kiloliter juta kiloliter Pak, jadi yang di DMO kan itu adalah yang 2,7 nya kalau kita melihat.

KETUA RAPAT:

Yang mana tuh, yang mana.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Yang mana, Pak.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Yang.

KETUA RAPAT:

Coba coba neracanya, ini makanya kita harus tuntas ini, tadi makanya saya bilang di awal.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Ya neraca ini, Pak.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Bisa tunjukkan, Pak.

KETUA RAPAT:

Silahkan, silahkan neracanya mana.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Di halaman 5.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Halaman 5.

KETUA RAPAT:

Kita harus sama dulu tuh, pijakan apa di mananya itu. Kalau pakai 52 juta atau mau pakai yang mana.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Saya mohon mohon izin Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya silahkan.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Nah, itu yang ekspor untuk di atas CPO-nya yang biru-biru itu semua ekspor Pak, yang biru-biru, nanti kalau DMO 30% di CPO, berarti 30% dari 2,7 juta kiloliter.

KETUA RAPAT:

Yang mana Pak?

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Yang.

KETUA RAPAT:

Oh yang ekspor yang atas itu?

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Ya yang, yang, yang biru-biru kotak-kotak biru di itunya tuh ada ekspor Pak, CPO di atasnya itu CPO di atasnya kan ada ke arah atas, itu kan ada biru Pak, biru, nah itu.

KETUA RAPAT:

Maksudnya gimana, jadi yang Bapak maksud yang di DMO-kan itu yang ekspor CPO yang 2,7 juta itu?

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Iya Pak, jadi kalau yang di kenai yang di berlakukan adalah terhadap ekspor produknya, Pak. Yang di dalam negeri kan nggak bisa di ya memang udah untuk di dalam negeri.

KETUA RAPAT:

Berarti itu kenapa di sebut nggak ada gunanya di di DMO-kan.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Ndak memang karena udah dalam negeri.

KETUA RAPAT:

Kan gini Pak, nah ini bentar dulu nih, tolong ya, saya ini dulu.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Siap.

KETUA RAPAT:

Yang CPO itu kan 52 juta Pak, produksi setahun.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Benar Pak.

KETUA RAPAT:

Oke, di pecah tuh Pak turunannya ada 3, 4 eh ada 3, ekspor CPO 2,7.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Iya.

KETUA RAPAT:

Refine palm oil 36 juta.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

38 untuk masuk ke jalur ini.

KETUA RAPAT:

Ya, PFAD itu 2,3 juta.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Siap.

KETUA RAPAT:

Sama ada yang dijadikan bio diesel 8 juta, oleokimia 2,3 juta.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Iya.

KETUA RAPAT:

Yang mana Pak yang di DMO-kan, Pak?

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Jadi yang yang di dalam negeri ini, ini kan memang sudah memang sudah seperti itu di dalam negeri. Nah, sekarang yang di ekspor ini.

KETUA RAPAT:

Jadi gini aja Pak, nggak gini aja Bang. Saya pikir ini nanti akan jadi pembahasan khusus kita agendakan lagi saja, saya rasa nggak akan selesai ini. Jadi gini Pak, saya mau izin teman-teman anggota, boleh nggak nanti kita nggak usah agendakan pembahasan DMO ini tapi kita bahas di rapat khusus antara kita dengan Kementerian Perindustrian saja.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Iya tapi usulan kami Pimpinan, dimasukan bahwasannya kita akan membahas DMO dan DPO untuk CPO ini pada raker berikutnya selanjutnya, merupakan catatan rapat atau kesimpulan rapat.

KETUA RAPAT:

Ya begitu Pak ya, jadi saya pikir nggak akan mungkin kita tuntaskan pembahasan DMO.

KETUM GAPKI (JOKO SUPRIYONO):

Mungkin buat tambahan aja Pak ya, sebagai gambaran yang regulasi DMO kemarin, sebenarnya kan DMO itu tadi Pak Dirjen ingin mengatakan basisnya adalah yang di ekspor. Selama ini karena sekarang konsen minyak goreng yang dijadikan DMO adalah ekspor yang berbasis untuk minyak goreng, itu apa CPO, RBD *palm oil*, RBD *palm olein*. Jadi ketiga-tiga ini sebenarnya adalah bahan baku untuk CP untuk minyak goreng. Jadi nah karena itu di dalam negeri kalau nggak salah ya angkanya kemarin angka saya itu kan ekspor untuk, untuk CPO, *refine*, RBD *palm oil*, dan *palm olein*, itu sekitar 20.

KETUA RAPAT:

2 juta.

KETUM GAPKI (JOKO SUPRIYONO):

25 juta, 27 juta.

KETUA RAPAT:

Ya karena di situ 22 juta.

KETUM GAPKI (JOKO SUPRIYONO):

Nah itu lah yang sebenarnya mestinya 20%-nya harus untuk alokasi dalam negeri untuk kebutuhan minyak goreng sama.

KETUA RAPAT:

Ya artinya begini Pak maksud saya, yang saya maksud kita nggak bisa pakai patokan yang ekspor 2,7 juta itu. Seharusnya yang Bapak jadikan patokan itu yang RBD *palm oil* eh, *palm olein*, *olein* itu.

Iya, makanya salah tapi nggak apa-apa, makanya gini aja Pak. Nanti kita agendakan saja di di rapat selanjutnya terkait pembahasan DMO ini. Selanjutnya saja juga menarik tadi ada ada 2 sebetulnya isu masalah minyak jelantah itu ya juga menarik itu sebetulnya untuk kita angkat nanti, sama terkait *repacking*.

Terakhir ya dari Mbak Juwi, silahkan Mbak Juwi.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang kami hormati Pimpinan,
Sahabat Komisi VII,
Yang kami hormati Pak Dirjen, beserta seluruh
Ketua dari berbagai Asosiasi yang ada di sini juga termasuk yang non-asosiasi.

Bukan anti Pak Maman, non.

Terima kasih atas segala paparan juga penjelasan *plus* keluh kesah yang tadi disampaikan karena ini jujur bisa memperluas *preview* kami Bapak/Ibu sekalian, dan memang mohon maaf tadi saya agak terlambat karena ada agenda di fraksi namun karena mengingat pentingnya acara pada sore hari ini saya juga langsung menyusul ke sini, tapi saya sudah mengikuti secara *virtual* terutama terkait bagaimana Serikat Petani Kelapa Sawit tadi yang disampaikan.

Jujur Pak saya memang disini *stressing* nya itu terkait nasib-nasib mereka karena hari ini yang paling dirugikan dari segala sistem tata kelola niaga dari kelapa sawit di Indonesia itu tetap yang menderita itu adalah petani-petani kelapa sawit. Tidak ada istilahnya keuntungan yang mereka peroleh dari kenaikan harga *palm oil* yang di *trading* dunia ini tidak ada relevansinya dengan kenaikan kesejahteraan mereka begitu dan ini merupakan sebuah PR yang sangat besar selain berbagai PR-PR lingkungan yang disebabkan oleh banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang ada di negara kita.

Cuman selain dari masalah-masalah tersebut, saya percaya, saya yakin bahwa kita semuanya yang hadir disini ini memiliki frekuensi yang sama, yang pertama merah putih, yang kedua baru keuntungan Pak Maman. Saya yakin meskipun beliau-beliau ini pengusaha yang di dalam otaknya kalau Pak Bambang Patijaya bilang cuman cuan dan cuan, saya yakin di hati sanubari saudara-saudara sekalian ini tetep ada pemikiran tentang bagaimana kita harus mengutamakan kesejahteraan rakyat dan bangsa kita sendiri yang kita peras keringatnya setiap hari, yang membantu kita mengumpulkan pundi-pundi untuk memperkaya diri sendiri maupun perusahaan yang kita miliki begitu.

Saya ingin menggarisbawahi di sini ya Pak Ketua, mungkin di lain kesempatan terserah bagaimana skemanya entah itu rapat koordinasi, rapat gabungan, atau pansus mungkin. Saya ingin kita bisa menghadirkan Badan Pengatur Dana Kelapa Sawit, oh ya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, namanya aja susah banget. Ini kalau tidak salah masuk di Komisi XI Pak Ketua, jadi mungkin kita bisa menyampaikan kepada rekan-rekan di Komisi XI bagaimana nanti aturannya sehingga kita bisa bersama-sama menghadirkan badan tersebut.

Kita pengen tahu, sebesar apa sih sumbang asih beliau-beliau ini ke teman-teman yang ada di tata niaga pengelolaan kelapa sawit ini, yang kemarin ngeklaim kalau sudah menyerap 16,5 Juta tenaga kerja ini. Pemerintah kan

seharusnya bisa hadir lewat badan tersebut begitu, kita pengen tahu seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh badan tersebut terhadap teman-teman yang ada di lapangan.

Yang berikutnya Pak Dirjen, saya ingin bertanya terkait bagaimana pemerintah dalam hal ini, kok terus-menerus bisa memberikan perizinan pembukaan lahan baru bagi perkebunan besar swasta, perkebunan rakyat termasuk perkebunan besar negara. Padahal pada temuan BPK RI tercatat ada 81% perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia yang belum memenuhi aturan yang berlaku, mulai dengan izin yang belum lengkap, hak guna usaha yang tidak sesuai, serta pelaporan keuangan yang tidak wajar. Nah, ini mungkin juga nanti perlu didiskusikan Pak, karena semakin banyak pemain semakin terkecilkan ini petani-petani kita, Pak.

Yang berikutnya, terkait masalah DMO dan DPO tadi, Ketua. Saya kira itu hal yang wajar kalau misalnya memang kita harus mengambil posisi tersebut, dengan catatan kita juga tidak boleh mengorbankan dunia usaha begitu. Jadi bagaimana kita bisa tetap menggunakan skema yang *win win solution*-lah kalau misalnya hari ini banyak sekali yang bilang bahwa di negara kita itu sudah mulai ada sistem *rule follow the money* itu harus bisa kita jaga dengan baik supaya hal-hal semacam itu tidak lagi terjadi.

Yang berikutnya, saya ingin meminta pandangan juga terhadap para istilahnya apa ya, kalau tadi Pak Maman bilang pendekar-pendekar gitu yang terlibat langsung dalam dunia tata niaga kelapa sawit mulai dari hulu sampai ke hilir ini, kira-kira apa nih yang bisa kita atur, apa yang bisa kita persiapkan sebagai *road map plan* bersama untuk mendukung perkembangan tata kelola industri kelapa sawit yang berbasis peningkatan nilai tambah produk dan juga penguatan dari kesejahteraan petani-petani yang ada.

Mungkin itu saja yang bisa kami tambahkan Pak Ketua, terima kasih atas waktunya, terima kasih juga atas kehadirannya, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami akhiri.

*Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thariq,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam Warahmatullah Wabarakatuh.

Terima kasih Mbak Ratna yang paling Juwita, Fraksi PKB, Pak.

Jadi saya pikir kita cukupi dulu ini, nanti apa yang tadi menjadi konsen Mbak Ratna dan teman-teman anggota Komisi VII mohon di jawab secara tertulis Pak, nanti kita masukan dalam kesimpulan rapat karena waktu juga sudah memasuki setengah 6. Kita masuk ke kesimpulan Pak ya, ya silahkan Pak tampilkan Mas.

Nanti ada beberapa usulan habis ini kita akan agendakan beberapa rapat Pak, rapat terkait pembahasan DMO dengan Kemenperin, dan juga rapat dengan beberapa Asosiasi untuk menindaklanjuti beberapa isu-isu tadi, kurang lebih seperti itu.

Apa.

F-P.DEMOKRAT (Drs. HENDRIK HALOMOAN SITOMPUL, M.M.):

Pimpinan, usulan untuk rapat berikutnya saya usulkan 12 perusahaan ekspor CPO di undang di sini, makasih.

KETUA RAPAT:

Ya, udah. Waduh, udah belum?

Gini aja, ini saya bacakan aja ya usulan kesimpulan ya, nanti di disempurnakan. Serahkan saja ke Pak Dirjen.

Itu bukan catatan rapat Mbak, itu masukin aja poin ke-4. Komisi VII DPR RI akan mengagendakan agenda lebih lanjut terkait pembahasan *domestic market obligation*, itu aja.

Gimana, nggak segerakan saja kasih kesana, udah jam setengah 6 soalnya.

Nggak, *fotocopy*-an yang ini aja, kasih ke yang Pak Dirjen.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Jadi tadi memang banyak pertanyaan-pertanyaan, tapi banyak sebenarnya yang *domain*-nya bukan di Kementerian Perindustrian.

KETUA RAPAT:

Iya, yang Bapak jawab nanti *domain* Bapak aja, yang Bapak respon.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Iya, seperti banyak DMO, DPO, ini kan di perdagangan. Terus tadi juga banyak terkait dengan PKS ya Pengolahan Pabrik Kelapa Sawitnya ini kan pembinaannya di pertanian, Pak.

Jadi ini kita, iya perusahaannya bener perusahaannya itu pertanian. Jadi KBRI untuk PKS, sehingga jadi banyak yang memang kami agak kesulitan untuk menjawab, seperti yang PDMO bukan *domain* kita, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Nggak apa-apa, baca dulu, Pak.

Udah, itu ada, ya udah ada, ini waktu soalnya. Udah, Bapak baca Pak itu aja dulu Pak kalau Bapak oke, nanti kita selesaikan lebih lanjut aja teknisnya.

Artinya terkait DMO dan DPO Bapak menganggap itu bukan *domain* perindustrian ya.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Kalau untuk penetapan ketetapan kebijakan DMO itu, itu di perdagangan.

KETUA RAPAT:

Oke ya udah kita coret berarti, bukan disini berarti.

Udah, itu hanya 3 aja, Pak.

1. Komisi VII DPR RI mendorong Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian RI untuk tetap melanjutkan pengembangan dan penyempurnaan *platform* Simirah guna mendukung pendistribusian minyak goreng di dalam negeri.
2. Komisi VII DPR RI mendukung Dirjen Agro Industri Kementerian dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen dan konsumen produk turunan minyak sawit dunia, sehingga mampu menjadi penentu harga *price center* CPO global.
3. Komisi VII DPR RI meminta Dirjen Agro untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan dengan anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan paling lambat tanggal 31 Mei.

Tiga itu aja Pak, selanjutnya yang keempat.

4. Komisi VII DPR RI akan mengagendakan agenda rapat selanjutnya terkait dengan Kementerian dan mitra terkait.

Udah itu aja, itu aja Pak ya, oke Pak ya.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Kalau boleh kalau boleh Pak yang nomor 1 itu, *platform* Simirah guna mengkonsolidasikan.

KETUA RAPAT:

Oke, berubah ya.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Produsen, ya produsen CPO, RDPO, dan minyak goreng serta pendistribusiannya pendistribusian minyak goreng. Ini ada bukan hanya pendistribusian aja tapi itu ada produsen ya produsennya, ya masalah kewenangan, itu aja Pak Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Dan pendistribusian, oke itu ya.

Saya pikir cukup, nanti tolong dari Sekretariat koordinasi dengan Pak Kementerian untuk di sempurnakan ini soal *meeting* ini.

Ya saya pikir.

KETUM SPKS:

Pak mohon tambahan Pak, mungkin di atasnya mungkin perlu ditambahkan Serikat Petani Kelapa Sawitnya belum ada.

KETUA RAPAT:

Oh ya, ya, itu eksistensi itu. serikat tolong tambahkan nanti.

KETUM ASOSIASI PETANI PERJUANGAN:

Sama itu Pak Pimpinan ASKAP Indo Perjuangan juga nggak ada tadi.

KETUA RAPAT:

Oh, oke .

Oke, ya sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatian Bapak-Bapak dan Ibu-ibu semua untuk bersedia hadir. Sekali lagi bahwa rapat ini adalah rapat *preliminary discussion* terkait mengenai industri minyak goreng di negara kita. Yang pastinya Komisi VII akan menindaklanjuti lebih lanjut dan lebih detail terkait mengenai isu industri minyak goreng ini karena setelah dari diskusi rapat kita ini banyak beberapa hal yang memang harus kita tindaklanjuti dalam rangka untuk mendorong perbaikan industri minyak sawit kita eh minyak kelapa sawit kita.

Terakhir Pak dari Pak Dirjen ada.

DIRJEN AGRO KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Terima kasih Pimpinan, anggota Komisi VII DPR RI. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa, ini adalah perhatian yang benar-benar kita harapkan bagaimana industri ini bisa mempunyai suatu apa basis ya basis pengembangan yang stabil Pak, nggak terganggu. Jadi kalau terus seperti ini mungkin tidak akan sehat bagi iklim usaha industri, sehingga kami sangat setuju Bu Ratna tadi bilang bagaimana kita menyepakati ya *road map* bersama, ya baik itu di kebijakan maupun di pelaksanaan kebijakan itu sehingga kita benar-benar bisa menjaga memang kepentingan rakyat, kepentingan nasional, dan kepentingan global sebenarnya juga yang perlu kita perhatikan.

Mungkin demikian Pak Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota Dewan, terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Oke, kalau gitu terima kasih banyak, saya sebelumnya saya mengucapkan banyak banyak terima kasih, mohon maaf apabila ada perkataan kami yang kurang berkenan. Namun itu semua semangatnya dalam rangka untuk perbaikan, saya pikir itu.

Oleh karena itu dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* dan *alhamdulillah* rapat kita tutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.30 WIB)

a.n. Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

Dra. Nanik Herry Murti
NIP.196505061994032002